



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2020

ADMINISTRASI. Pemerintah. Rencana Kerja. 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2021.

Pasal 2

- (1) RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Narasi RKP Tahun 2021, yang terdiri atas:
 1. Bab 1, Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematisa;
 2. Bab 2, Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019, Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pascapandemi Covid-19, Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
 3. Bab 3, Tema dan Sasaran Pembangunan yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Arah Presiden, Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, serta Prioritas Nasional;
 4. Bab 4, Prioritas Nasional dan Pendanaannya yang menjabarkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional dan masing-masing memuat sasaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, Proyek Prioritas Strategis/Major

- Project, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan untuk Prioritas Nasional;
5. Bab 5, Kaidah Pelaksanaan yang memuat Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Kerangka Evaluasi dan Pengendalian; dan
 6. Bab 6, Penutup, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
- b. Matriks Pembangunan yang memuat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, dukungan terhadap arahan Presiden, target, yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan
 - c. Matriks Major Project yang memuat Proyek Prioritas Strategis/Major Project pada Prioritas Nasional beserta alokasi pendanaannya, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabarkan dalam Daftar Proyek Prioritas yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) digunakan, antara lain, untuk:
 - a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2021; dan

- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2021 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2021.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

Pasal 5

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan hasil pemutakhiran RKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden.
- (3) Hasil pemutakhiran RKP Tahun 2021 yang telah dilaporkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 6

- (1) Kementerian/Lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pemantauan dan evaluasi berbasis elektronik dan/atau mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga tahun berikutnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

Matriks Pembangunan RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PPO)	SASARAN	INDIKTOR	DURINGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Meningkatkan Ketahanan Energi dengan Meningkatkan Penanaman Modal Berbasis Teknologi (E3T)	Meningkatnya Penanaman Modal Berbasis Teknologi (E3T)	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (GW)	2	11,80	73.087.725,0	
		Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta Kilo Liter)	2	10,20		
KP : Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan Prop : Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Meningkatnya Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW) P1	2	1.001,10		Kemren ESDM
		Kapasitas Terpasang Tambahan PLTA (MW)	2	440,3		
KP : Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Mabati	Meningkatnya Pasokan Bahan Bakar Mabati	Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Panas Bumi (MW)	2	80,00		
		Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Bioenergi (MW)	2	152,00		
KP : Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Meningkatnya Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Kapasitas Terpasang Tambahan PLTS (MW)	2	328,8		
		Jumlah Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta KL)	2	10,20		
Prop : Perluasan Pererapan Efisiensi Energi Domestik	Terlaksananya Perluasan Pererapan Efisiensi Energi	Persentase Mandatori Pencampuran BBN ke dalam Bahan Bakar Fosil (%)	2	Mandatori B30		Kemren ESDM
		Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)	2	138,00		
Prop : Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	Meningkatnya Pemenuhan Energi Domestik	Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	2	0,90		
		Persentase Penyediaan Penyusutan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) (%)	2	100,00		
Prop : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	Terlaksananya Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri (Laporan)	Alokasi Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DND) yang Dipecahkan (Juta Ton)	2	168,00		
		Persentase Pemenuhan Gas Bumi Domestik (%)	2	65,00		
KP : Pengembangan Industri Pendukung EBT	Meningkatnya Pengembangan Industri Pendukung EBT	Jumlah Laporan Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri (Laporan)	2	1,00		Kemren ESDM
		TKDN sektor pembangkit EBT (%)	2	44,00		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Pop : Pengembangan Industri EBT	Terlaksananya Pengembangan Industri EBT	TKDN Sektor EBT dalam Rangka Mendukung Kemandirian Energi Nasional (Indeks Skala 100)	2	55,45		Kemen ESDM
PP : Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (m³/kg)	5	3,30		
KP : Pemanfaatan Kawasan Berfungsi Lindung (kumulatif)	Meningkatnya pemanfaatan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan Berfungsi Lindung (kumulatif) (juta ha)	5	65,00		
Pop : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (Ekoragion)	5	7,00		Kemen LHK
Pop : Perindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Terlaksananya Perindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi (desa)	5	1.500,00		Kemen LHK
KP : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)	2	1.500,00		
Pop : Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan (uta m ³)	2	30,00		Kemen LHK
Pop : Penguatan Keastuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya penguatan Keastuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya (unit non padi (ha))	5	40,00		Kemen LHK
KP : Penyediaan Air untuk Pertanian	Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan non padi (ha)	2	17.860		
Pop : Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi	Terlaksananya Pembarugaran dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (ha)	2	16.860		Kemen PU/PR
Pop : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (ha)	2	51.400		Kemen PU/PR
Pop : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (ha)	2	1.000		Kemen PU/PR
KP : Penyediaan Air Bakau untuk Kawasan Prioritas	Meningkatnya penyediaan air bakau untuk kawasan prioritas	Jumlah debit air bakau untuk kebutuhan domestik, hidroelektrik, dan kawasan unggulan (m³/detik)	2	88,79		
Pop : Penyediaan dan Pengamanan Air Bakau dan Air Tanah	Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air bakau dan air tanah	Tambahan penyediaan air bakau (m ³ /detik)	2	4,92		Kemen PU/PR dan Kemen ESDM
KP : Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan (ha)	2	385.000,00		
Pop : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi secara rasional (ha)	2	385.000,00		Kemen LHK
Pop : Revitalisasi/Peaydelmanan Danau Prioritas Nasional	Terlaksananya revitalisasi/ peaydelmanan Danau Prioritas Nasional	Perbaikan kualitas danau prioritas nasional (danau prioritas)	2	15,00		Kemen LHK dan Kemen ATR
KP : Pengembangan Waduk Multiguna	Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m³) (kumulatif)	2	15,10		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
				22		
Pop : Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	Tertaksananya Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah bendungan yang direvitalisasi dan dioptimalkan pemanfaatannya (unit)	2	13		Kemen PUPR
Pop : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Tertaksananya Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit)	2	15		Kemen PUPR
PP : Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan ditingkatkan manfaatnya (unit)	2	7		
		Nilai Tukar Petani (NTP) (mali)	5	102,00-104,00		
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/hari)	5	2.100,00		
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	5	57,00		
		Prevalensi of Undernourishment (PoU) (%)	5	5,80		
		Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	5	4,80		
		Konsumsi Ikan (2,2-2(c)) (kg/kapita/tahun)	5	58,08		
		Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	5	13,80		
		Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	5	273,20		
		Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	5	10,70		
		Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi ((%) Kementerian SPKTI)	5	40,00		
		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	5	85-95		
		Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	2	50.000,00		
		Persentase pangan organik** (%)	5	8,00		
Pop : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Tertaksananya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	Jumlah produksi ubi kayu (tuna ton)	5	21,23		Kemertan
Pop : Peningkatan Keamanan Pangan	Tertaksananya peningkatan keamanan pangan	Jumlah produksi ubi jalar (tuna ton)	5	2,10		Kemertan
Pop : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Tertaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Rasio indeks hasil UPTK dan HPK pada komoditas pertanian melalui media pembenah di tempat pemusnahan/ penggabaran yang ditempatkan (%)	5	91,00		Kemertan
Pop : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Tertaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Pertanian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan (tuna ton)	5	1,00		Kemertan
KP : Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Perikanan, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan pangan hasil perikanan, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penggunaan Benih Bersertifikat (%)	5	65,00		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
<p>Prop 1 : Peningkatan Produksi Padi</p> <p>Prop 2 : Peningkatan Produksi Jagung</p> <p>Prop 3 : Peningkatan Produksi Kedelai</p> <p>Prop 4 : Peningkatan Produksi Daging</p> <p>Prop 5 : Peningkatan Produksi Hortikultura</p> <p>KP : Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kespastian Pasar</p> <p>Prop : Asuransi Pertanian</p> <p>Prop : Pendidikan Pertanian</p> <p>Prop 1 : Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang</p> <p>Prop : Korporasi Petani</p> <p>KP : Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian</p>	<p>Meningkatnya produksi padi</p> <p>Meningkatnya produksi jagung</p> <p>Meningkatnya produksi kedelai</p> <p>Meningkatnya produksi daging</p> <p>Meningkatnya produksi hortikultura</p> <p>Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kespastian pasar</p> <p>Tertaksananya asuransi pertanian</p> <p>Tertaksananya pendidikan pertanian</p> <p>Tertaksananya penyuluhan dan pendampingan Sekolah Lapang</p> <p>Berkembangnya korporasi petani</p> <p>Meningkatnya keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian</p>	<p>Ketersediaan Beras (juta ton)</p> <p>Ketersediaan Protein Hewan (juta ton)</p> <p>Produksi Jagung (juta ton)</p> <p>Produksi daging (juta ton)</p> <p>Produksi umbi-umbian (juta ton)</p> <p>Produksi sayuran (juta ton)</p> <p>Produksi buah-buahan (juta ton)</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>42,70</p> <p>2,60</p> <p>31,90</p> <p>4,20</p> <p>24,60</p> <p>16,20</p> <p>23,12</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	<p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p> <p>Kementerian</p>
		Meningkatnya produksi padi (%)	5	5,67	Kementerian	
		Meningkatnya produksi jagung (%)	5	3,40	Kementerian	
		Meningkatnya produksi kedelai (%)	5	7,08	Kementerian	
		Meningkatnya produksi daging (%)	5	5,28	Kementerian	
		Meningkatnya produksi hortikultura (%)	5	2,70	Kementerian	
		Meningkatnya produksi sayuran (%)	5	4,30	Kementerian	
		Meningkatnya produksi buah-buahan (%)	5	70,80	Kementerian	
		Teknologi yang diterapkan oleh petani ((%)) Rp juta/awaga keaja (tahun)	5	51,70	Kementerian	
		Jumlah asuransi usaha tani padi (hektar)	5	1.000.000,00	Kementerian	
		Jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau (ekor)	5	150.000,00	Kementerian	
		Perentase lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	5	75,00	Kementerian	
Perentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	5	65,00	Kementerian			
Perentase Kembangkan petani yang meningkatkan kapasitasnya (%)	5	19,00	Kementerian			
Jumlah korporasi petani (korporasi)	5	33,00	Kementerian			
Perentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ((%))	5	65,00	Kementerian			
Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2:5:1) (Varietas unggul baru dan gatu)	5	308	Kementerian			
Sumber daya genetik tanaman dan hewan sumber pangan yang terdindungi/tersedia (2:5:2) (akses)	5	4.250,00	Kementerian			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	Terkecilnya sumber daya air pertanian	Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan (%)	5	34,35		Kemertan
Prop : Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	Terkecilnya sumber daya lahan pertanian	Indeks ketersediaan lahan pertanian (nilai)	5	65,84		Kemertan
		Indeks keberlanjutan lahan pertanian (nilai)	5	99,84		
KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Terlaksananya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index (nilai)	5	65,50		
Prop : Stabilitas Harga Pangan	Terlaksananya stabilitas Harga Pangan	Koefisien Variasi Harga Pangan (%)	5	2,00		Kemertan dan Kemendag
Prop : Peningkatan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Terlaksananya peningkatan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5	16,00		Kemertan
		Cadangan pangan Nasional (Juta ton)	5	2,00		
PP : Peningkatan Pengelolaan Kemertanian, Perikanan Dan Kelautan	Meningkatnya pengelolaan kemertanian, perikanan, dan kelautan	Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	5	24,60		
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam kawasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	5	587		
		Produksi Perikanan (juta ton)	5	27,55		
		Produksi garam (juta ton)	5	3,10		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (nilai)	5	102,104		
		Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)	5	11,00		
		Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)	4	11,00		
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	4	22,00		
		Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP (WPP)	4	5,00		Kemertan
Prop : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Jumlah KSN dan KSNIT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNIT dan antarwilayah laut (RZ)	5	22,00		Kemendagri, Kemertan, KBIG
Prop : Peningkatan Pemantauan dan Rencana Zonasi Pesisir	Terlaksananya pengendalian pemantauan ruang laut	Jumlah pengendalian pemantauan ruang laut dan reklamasi (lokasi)	5	9,00		Kemertan
KP : Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemantauan Jasa Kelautan	Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemantauan jasa kelautan	Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kawasan)	5	10,00		
Prop : Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	6,00		Kemertan
Prop : Pengembangan Marine Bioproducer dan Bioteknologi	Terlaksananya pengembangan <i>marine bioproducer</i> dan bioteknologi	Jumlah bioteknologi dan bioteknologi yang dikembangkan (paket)	5	8,00		Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	Meningkatkan produktivitas, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	5	16,00	Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari Kemari	
		Meningkatkan produktivitas perikanan	5	11,55		
		Meningkatkan produktivitas perikanan	5	8,08		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	7,92		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	11,55		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	3,10		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	90,00		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	3,30		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	102,00		
		Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	125,000,00		
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	20,500,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	4	34,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	8,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	1	410,000,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	26,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	26,50				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	2,50				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	5,20				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	9,00				
Meningkatkan produktivitas rumput laut	5	7,990,00				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Perluasan Kemiripan Usaha	Terlaksananya perluasan kemiripan usaha	Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemiripannya (UMKM)	5	777,00		Kemen KUKM, KPPU
		Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya (UMKM)	5	500,00		Kemen KUKM
Prop : Penguatan kapasitas kelembagaan untuk Bermitra	Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)	5	20,30		
		Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (%)	5	2,80		
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirasaha	Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirasaha	Proporsi penyulutan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi (%)	5	65,00		
		Jumlah wirasaha pemula yang mendapat modal usaha (orang)	5	6.900,00		Kememparetraf, Kemen KUKM
Prop : Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan (UMKM)	5	10.000,00		Kemen KUKM
Prop : Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembayarannya (UMKM)	5	850,00		Kemen KUKM
Prop : Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirasaha dan UMKM	Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirasaha dan UMKM	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (koperasi)	5	75,00		Kemen KUKM
KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditandingkan kapasitasnya (orang)	5	2.300,00		Kemen KUKM
Prop : Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi (orang)	5	3.000,00		Kemen KUKM
Prop : Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya (koperasi)	5	525,00		Kemen KUKM
Prop : Pengembangan Inovasi Koperasi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi kepada Koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi (koperasi)	5	225,00		Kemen KUKM
KP : Peningkatan Penciptaan Start-up dan Peluang Usaha	Meningkatnya penciptaan start-up dan peluang usaha	Jumlah Wirasaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB)	5	1.650,00		
		Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1.7) (%)	5	18,80		
Prop : Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kepada wirasaha atau calon wirasaha	Penumbuhan start-up (start-up)	5	700,00		
		Jumlah wirasaha yang dilatih (orang)	5	82.400,00		Kemempertin, Kemendikbud, Kemendiknas, KemendikUKM, Kemen PPPA, Kemempora

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Inkubasi Usaha	Terlaksananya inkubasi kepada wirusaha	Jumlah wirusaha yang diinkubasi (Orang)	5	200,00		Kemen KUKM, Kempertekraf, Kemempem
Prop : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha	5	7.170,00		Kememperti, KemenKUKM, Kemendag
Prop : Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Sentra IKM Kumuhlatif)	5	20,00		Kememperti
KP : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	Kontribusi usaha sosial (Persen PDB)	5	2,10		Kemen KUKM
Prop : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Terlaksananya pembinaan wirusaha sosial	Jumlah Lembaga yang membina wirusaha sosial (Lernbag)	5	44,00		
PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rili, dan Industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor rili, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB Industri pengolahan non migas (%)	5	4,75-5,54		
		Kontribusi PDB Industri pengolahan non migas (%)	5	17,63-17,84		
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	5	1,277,00		
		Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	1	17,90		
		Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9,2,21) (%)	1	14,60		
		Jumlah tenaga kerja parawisata (8,9,27) (juta orang)	1	10,50		
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	1	17,90		
		Pertingkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ BODB (Peningkat)	5	menjua 40		
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	5	858,50		
		Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri pengolahan (Rp Triliun)	5	268,70		
KP : Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemitriman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemitriman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (%)	5	5,00-5,50		
		Pertumbuhan PDB perkebunan (%)	5	5,00		
		Peningkatan produksi kakao (%)	5	2,30		
		Peningkatan produksi kopi (%)	5	1,50		
		Peningkatan produksi kelapa sawit (%)	5	5,90		
		Pertumbuhan PDB hortikultura (%)	5	5,80		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop 1: Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	Tertaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	Produkasi Kopi (tuna ton)	5	0,78	Kemendagri, Kemertan, Kempertan, Kemendag Perdagangan	
		Produkasi Kakao (tuna ton)	5	0,76		
		Produkasi Keper (tuna ton)	5	3,63		
		Produkasi Kelapa Dalam (tuna ton)	5	2,98		
Pop 1 - Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	Tertaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	Pertumbuhan volume ekspor pertanian (%)	5	1,35	Kemertan	
Prop 2: Pengembangan Industri Berbasis Ketahanan	Tertaksananya pengembangan industri berbasis ketahanan	Pertumbuhan PDB Industri Runtur (%)	5	4,00-5,00	Kemertan, KLHK	
Prop 2: Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Logam	Tertaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	Pertumbuhan PDB Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (%)	5	6,00-7,25	Kemertan, KLHK	
RP : Peningkatan Industri/Handal Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam termasuk melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri terutama di Luar Jawa	Walaupun industri/Handal berbasis Hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (di KEK Industri)	5	5,00	Kemertan, Kemertan ESDM, Kemertan Kemendag, BPN, BWS	
Prop 2: Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	Tertaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	Pertumbuhan PDB Industri Logam Dasar (%)	5	5,00 - 6,25	Kemertan, Kemertan ESDM, Kemertan Kemendag, BPN, BWS	
Prop 2: Pemanfaatan Mineral dan Batu bara untuk Peningkatan Nilai Tambah	Tertaksananya pemanfaatan mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (%)	2	75,53	Kemertan, KLHK	
		Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (%)	2	50,00		
		Destinasi pariwisata prioritas yang diperoleh pengembangannya (destinasi)	5	10,00		
KP : Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Revitiliasi destinasi Bali (destinasi)	5	1,00	KLHK	
		Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit)	5	25,00		
		Destinasi wisata berbasis Geopark (destinasi)	5	16,00		
		Destinasi wisata bahari (destinasi)	5	6,00		
Prop 2: Pengembangan 25 kawasan hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Tertaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (destinasi)	5	25,00	KLHK	
Prop 2: Peningkatan Aksesibilitas, Amertitas,	Tertaksananya peningkatan aksesibilitas, amertitas,	Destinasi yang dikembangkan aksesibilitas, amertitas,	5	18,00	Kemendagri,	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ REGALAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
dan atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata	dan atraksi, serta daya dukung (destinasi)				Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk melalui Desa Wisata	Tertaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata (destinasi provinsi)	5	13,00		Kemendagri
Prop : Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	Tertaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata (destinasi)	4	3,00		Kemendagri
Prop : Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	Tertaksananya pengembangan 16 destinasi pariwisata geopark	Jumlah koordinasi pengembangan Geopark (kegiatan)	5	1,00		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (%)	5	5,3-5,5		
Prop : Penyediaan Inisiatif Inovasi dan Pengembangan Brand	Tertaksananya penyediaan inisiatif inovasi dan pengembangan brand	Jumlah Skema Inisiatif Inovasi dan Pengembangan Brand (skema)	5	3,00	8,27-10,11	Kemendagri
Prop : Penyediaan Inisiatif Percepatan dan Komersialisasi HKI	Tertaksananya penyediaan inisiatif percepatan dan komersialisasi HKI	Jumlah penyediaan inisiatif percepatan dan komersialisasi HKI (kegiatan)	5	2,00		Kemendagri
Prop : Fasilitas Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan	Tertaksananya fasilitas rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan	Jumlah fasilitas rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan (kegiatan)	5	13,00		Kemendagri
Prop : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	Tertaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif (kegiatan)	5	19,00		Kemendagri
Prop : Pengembangan Start-up Purks dan Center of Excellence	Tertaksananya pengembangan start-up purks dan center of excellence	Jumlah start-up purks dan center of excellence yang dikembangkan (kegiatan)	5	3,00		Kemendagri
Prop : Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	Tertaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	Jumlah pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif (kegiatan)	5	5,00		Kemendagri
Prop : Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)	Tertaksananya pengembangan kawasan Be Creative District (BCD)	Jumlah kawasan Be Creative District (BCD) yang dikembangkan (kegiatan)	2	1,00		Kemendagri, EKPMD
KP : Perubahan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Kemitraan	Tertaksananya perubahan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi kemitraan	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	5	49,70		
Prop : Kapasitas Hukum Berusaha dan Investasi	Tertaksananya kapasitas hukum berusaha dan investasi	Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	4	bertahap		Kemendagri, EKPMD, Kemendagri
Prop : Fasilitas Kemudahan Usaha dan Investasi	Tertaksananya fasilitas kemudahan usaha dan investasi	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah perumahan modal di Wilayah I, II, III, dan	5	124,00		Kemendagri, EKPMD, Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Investasi	Investasi	IV (perusahaan)				Kemendag, Kemendagri
Prop : Peningkatan Iklim Kecemagkerjaan dan Hubungan Industri	Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan Daog sosial pada perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan daog sosial (orang)	5	1.634.775,00		Kemendagri, Kemendag, BIP2MI, Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
KP : Pengembangan Industri Halal	Meningkatnya pengembangan industri halal	Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi (sektor industri)	5	2,00		
Prop : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	Terlaksananya peningkatan pengembangan infrastruktur industri halal	Jumlah kawasan dengan zona tematik industri halal yang difasilitasi (kawasan Industri)	5	2,00		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Neraca perdagangan (US\$ miliar)	5	10.76-12,75		
		Pertumbuhan ekspor nominas (%)	5	5.96-7,86		
		Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	5	4.0-7.0		
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perbulan)	5	180-220		
		Pertumbuhan ekspor pertanian (%)	5	44.113,00		
		Ekspor hasil pertanian (FOB) (US\$ miliar)	5	4,30		
		Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5	6,05		
		Kontribusi ekspor industri pengolahan (%)	5	76,50		
		Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, limbah, mesin listrik, dll) (%)	5	11,40		
		Pertumbuhan ekspor non migas (%)	5	5.96-7.86		
		Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	5	2,80		
		Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	5	2,60		
		Nilai ekspor industri pengolahan (USD miliar)	5	122.8-127.5		
Prop : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	Terlaksanakannya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan (perusahaan)	5	30,00		Kemendagri
Prop : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitas pengembangan produk (produk)	5	155,00		Kemendagri
KP : Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor (negara)	5	220,00		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
pasar ekspor		Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (%)	5	1,30		
		Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (%)	5	3,30		
Pop 2: Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	Jumlah promosi dan misi dagang (kegiatan promosi)	5	26,00		Kemempri, Perkonomian, Kemendag
Pop 2: Fasilitas Ekspor	Terlaksananya Fasilitas Ekspor	Jumlah kegiatan fasilitasi ekspor (fasilitasi)	5	56,00		Kemperko Perkonomian, Kemempri, Kemendag Kemempri, Perkonomian, Kemendag Kemempri, Perkonomian, BSN
Pop 2: Peningkatan Daya Saing Industri/Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Terlaksananya Peningkatan Daya Saing Industri/Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Nilai Ekspor produk industri sektor ILMATE (USD Miliar)	5	41,08		
		Nilai Ekspor produk industri sektor Agro (USD Miliar)	5	57,05		
		Nilai Ekspor produk industri sektor IKRT (USD Miliar)	5	35,97		
		Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rata-rata Tertimbang) (%)	5	49,90		
		Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)	5	6.630,00		
KP : Pengelolaan Import	Memungkainya Pengelolaan Import	Jumlah wisatawan nusantara (8.9.10) (Juta perjalanan)	5	320-333		
Pop 2: Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	Jumlah pengawasan Post Border (Berlari Acara)	5	825,00		Kemempri, Kemendag
KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Memungkainya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (%)	5	5,00		
Pop 2: Pengembangan Sistem Katalog	Terlaksananya Pengembangan sistem katalog	Jumlah katalog produk dalam negeri (leatibag)	5	15,00		LKPP
KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produk Industri Global	Memungkainya partisipasi dalam jaringan produksi global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	5	4,00		
Pop 2: Peningkatan Investasi (Inbound &	Terlaksananya Peningkatan Investasi (Inbound &	Jumlah investasi asing yang masuk di sektor industri	5	5,00		Kemempri,

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
outbound Industri GPM Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	outbound Industri GPM berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	(investor/pertumbuhan)				Kemendag	
KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Meningkatnya Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah branding Wonderful Indonesia (destinasi branding)	5	10,00			
		Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD Miliar)	5	17,45			
		Jumlah warisan budaya yang divergenasi (konten, heritage regeneration) (lokasi)	5	8 (kumulatif)			
		Jumlah media branding (media)	5	4,00			Kemparekrif
		Jumlah Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru (regional pemasaran)	5	3,00			Kemparekrif
Pop? Branding Wonderful Indonesia	Pelaksanakannya media branding	Jumlah media branding (media)	5	4,00		Kemparekrif	
Pop? Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	Terlaksananya Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	Jumlah Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru (regional pemasaran)	5	3,00		Kemparekrif	
Pop? Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce	Terlaksanakannya Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce	Jumlah Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce (jenam/ orang)	5	89,00		Kemparekrif	
Pop? Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Kemudahan	Terlaksananya Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Kemudahan	Jumlah Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran (orang)	1	13.000,00		Kemparekrif	
KP : Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Meningkatnya efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (keperan)	5	91,00			
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (kegiatan)	5	88,00			
		Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)	5	4,00			
		Jumlah promosi "Tourism Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	5	8,00			
		PTA/FTA/CEPA yang diapresiasi (kesepakatan)	5	25 (kumulatif)			
Pop? Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negotiator) dan Keberhasilan Perwalian RI di Luar Negeri termasuk FTA Center termasuk FTA Center	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negotiator) dan Keberhasilan Perwalian RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negotiator (kegiatan)	5	1,00		Kempertin, Kemendag	
Pop? Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	Terlaksananya Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	Jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional (dokumen)	5	160,00		Kempertin, Kemendag	
Pop? Promosi Terintegrasi	Terlaksananya Promosi Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi (Pameran)	5	7,00		Kemenuh.	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saling Ekonomi	Meningkatnya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saling ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	5	4,17	Kememprian, BKPM, Kemendag	
		Biaya Logistik terhadap PDB (%)	5	22,20		
		Rasio M2/PDB (%)	5	39,74		
		Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)	5	36-39		
		Pembelian sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	5	11,99		
		Insbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	5	menurun		
		Rasio TKDD yang berhasil kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	5	25,94		
		Rasio Kredit/PDB (%)	5	32,60		
		Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)	5	56,30		
		Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	5	15,40		
KP : Penguatan Pendalaman Sektor Keuangan	Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	Skema pembiayaan berbasis HKI (skema)	5	1,00	Kementerian	
		Indeks Industri Keuangan (%)	3	80,00		
		Turnover Rasio SER (%)	5	5,02		
KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0	Nilai transaksi e-commerce (Rp triliun)	5	3,50	Kemendagri & Kemendek	
		Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi Infrastruktur TKI (Orang)	5	345,00		
		Jumlah fasilitator ekabahasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	1	9.000,00		
		Jumlah fasilitator ekabahasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (fasilitator)	5	200,00		
		Jumlah Perusahaan yang dilampiri (perusahaan)	5	195,00		
Pop : Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai	Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0				Kemendag	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA					
Karakteristik Industri	Memiliki karakteristik industri	Skor Logistic Performance Index (Indeks)	5	3,20							
							KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	2,0 - 4,0			
							Prop : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	5	67,00	Kemendag	
							Prop : Pengendalian Inflasi	5	2,3 - 4,3	Kemendag	
							KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	5	4,00		
							Prop : Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	5	10,00	Kemendagri	
							Prop : Penerapan Industri Hijau	5	2.000,00	Kemendagri, BSN	
							KP : Reformasi Pajak	5	100,00		
							Prop : Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	5	2,00		Kemendagri
							Prop : Perumusan Kebijakan terkait PPhBM Sektor Properti	5	100,00		Kemendagri
KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kesehatan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya kajian terkait PPhBM Sektor Properti	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, Terutama Pangan, Kesehatan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	5	3,00	1,00						
							Prop : Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	2,00	Kemendagri, BPS	
							Prop : Pengembangan Statistik e-commerce	5	1,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
							Prop : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perubahan Statistik Pangan	5	2,00	BPS	
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendanaan proyek:											
Ketahanan Pangan (termasuk pengembangan food estate di Kalteng)											

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Pengembangan Kawasan Industri (KI Teluk Bertani, KI Betang dan Subang) Dukungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Pembangunan Kawasan Industri
- 4) Peningkatan Kualitas
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (Pop) dan Proyek KI masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Finalized Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPRU/AP. Penulisan angka, identifikasi dan integrasi antarmasukan, dan sumber pendanaan (K, DAK, BUNN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGKAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP 2 : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamins Pemerataan PP : Pembangunan Wilayah Sumatera	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	Laju pertumbuhan PDPR Wilayah Sumatera (peresen/tahun)	5	3,9 – 5,1	72.138.283,2	
		Perentase penduduk miskin wilayah Sumatera (%)	5	70,1-76,5 9,6		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) [jumlah destinasi]	5	2		
		-Destinasi Pariwisata [jumlah destinasi]	5	2		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri [kawasan]	5	4		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan [jumlah KI]	5	1		
Provinsi Aceh						
Prop : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Tertaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh (nilai)	5	>1		Kemen PUPR
Prop : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Tertaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh (nilai)	5	>1		Kemen PUPR Kemendagri
Provinsi Sumatera Utara						
Prop : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Manggeli	Tertaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Manggeli	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara (nilai)	5	>1		KPNB, BKRIM, Kemen PUPR, dan Kemendagri
Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Araksi dan Amanas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	Tertaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Araksi dan Amanas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemen PUPR, Kemendagri dan Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sumatera Barat						
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat (nilai)	5	>1		Kemendub dan Kememparekrif
Provinsi Riau						
Provinsi Jambi						
Provinsi Sumatera Selatan						
Provinsi Bengkulu						
Provinsi Lampung						
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
Prop : Percepatan Akselerasi Arsitek dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Terlaksananya Perbaikan Akselerasi Arsitek dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (nilai)	5	>1		Kemendub, Kemendagri dan Kemendagri
Provinsi Kepulauan Riau						
Prop : Percepatan Peningkatan Investasi KPB/B Batam, Bintan, dan Karimun	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KPB/B Batam, Bintan, dan Karimun	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		BP Batam
Prop : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batam	Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batam	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		Kememperti dan Kemendagri
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		KemempUPPR, Kemendiko Kemartihan dan Investasi Kememparekrif
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Aceh						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kacao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kacao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5		Kemren KP	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh (%)	5		Kemren KP	
	Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5		Kemren ESDM	
	Provinsi Sumatera Utara						
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5		Kemren KP	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5		Kemren KP	
	Provinsi Sumatera Barat						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemertan		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Riau	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemen ESDM
	Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Tertaksananya optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemen ESDM
	Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Tertaksananya optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5		Kemen ESDM
Provinsi Jambi						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemen ESDM	
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemen KP	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5		Kemen KP	
Provinsi Sumatera Selatan						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5		Kemertan	
	Provinsi Bengkulu						
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5		Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5		Kemertan		
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5		Kemertan		
Provinsi Lampung							
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5		Kemertan		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kemren KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kemren KP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan ladu, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan ladu, pala, cengkeh	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemertan
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan tinah	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tinah	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemren KP
Provinsi Kepulauan Riau						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan ladu, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan ladu, pala, cengkeh	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%)	5			Kemren KP
KP : Pengembangan Kawasan Perikanan	Berkembangnya Kawasan Perikanan	Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%) Peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%) Aceh (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	46,25 42,56 38,5 38,56 56,13 59,26		Kemertan Kemren KP

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Pematangsiantar (angka perhitungan sementara)	5	54,34		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Gunungsitoli (angka perhitungan sementara)	5	36,44		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Padang (angka perhitungan sementara)	5	46,22		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Solok (angka perhitungan sementara)	5	40,99		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Bukittinggi (angka perhitungan sementara)	5	47,22		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Dumea (angka perhitungan sementara)	5	57,47		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Pekabarnu (angka perhitungan sementara)	5	60,76		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Jambi (angka perhitungan sementara)	5	42,31		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB WM Palembang (angka perhitungan sementara)	5	47,47		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Prabumulih (angka perhitungan sementara)	5	48,01		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Labuhaninggau (angka perhitungan sementara)	5	54,5		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Bangkulu (angka perhitungan sementara)	5	44,44		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Bandar Lampung (angka perhitungan sementara)	5	44,38		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Pangkal Pinang (angka perhitungan sementara)	5	45,28		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Tanjungpinang (angka perhitungan sementara)	5	46,5		
		Skor Indeks Kota Berkelayutan/IKB Kota Batam (angka perhitungan sementara)	5	50,18		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKW/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKW/PKW (kota)	5	20		
	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Aceh	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	2		
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	4		Kemendhub, KemendPUK, Kemend ESDM
Provinsi Sumatera Utara	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemendag, Kemendhub, Kemend PUPR, Kemend ESDM, KemendPUPR dan KemendPUK
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3		Kemendhub, Kemend ESDM, KemendPUPR
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3		Kemendhub, Kemend ESDM, KemendPUPR
Provinsi Riau	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	2		Kemendhub
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemendhub
Provinsi Jambi	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemend ESDM dan Kemendhub
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemend ESDM dan Kemendhub
Provinsi Sumatera Selatan	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Prop : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Provinsi Bengkulu	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Provinsi Lampung	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemend PUPR, Kemendhub, BPS, Kemend ESDM,

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kepulauan Riau Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Berkebangsaan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKV/PKW Tumbuhnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKV/PKW (kota)	5	2	Kemen PUPR, Kemendub, Kemen ESDM	
		Peningkatan Status Pengembangan Desa menjadi Berkebang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	57,85		
		Panurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	10,1 - 10,5		
		Rata-rata nilai Indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Pon IPKP)	5	55,98		
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Pulau Sumatera (IPKTI)	5	56,59		
		Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	5	56		
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraannya dan tata kelolanya di Pulau Sumatera (kecamatan)	5	0,47		
		Rata-rata nilai Indeks Pengolahan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sumatera	5			
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2017)		
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraannya dan tata kelolanya di Prov Aceh (kecamatan)	2	2		
Provinsi Aceh	Tertaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (pon Indeks Desa)	2	55,95	Kemendesa PUPP, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Tertaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Koh. Aceh Timur (Poin IPKP)	5	61,95	Kemendesa PUPP	
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kampung Nusantara, Samar Kilang, dan Sehat	Tertaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kampung Nusantara, Samar Kilang, dan Sehat	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Provinsi Aceh	5	55,99	Kemendesa PUPP, Kemen ATR/BUM	
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraannya dan tata kelolanya di Prov Aceh (kecamatan)	2	2	Kemendesa PUPP	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang Provinsi Sumatera Utara	Berkebangwa Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perumahan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,45	Kemendesa PDTT, KNP, Kemendagri	
		Prop : Pembangunan Desa Terpadu	2	51,89	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir (Poin IPKP)	5	61,95	Kemendesa PDTT	
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Sumatera Utara (kecamatan)	2	1	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	65,37	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lutung Sibuh	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lutung Sibuh	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam (Poin IPKP)	5	53,62	Kemendesa PDTT	
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	64,05	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,28	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuwangi Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuwangi Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Banyuwangi (Poin IPKP)	5	48,86	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Riau (kecamatan)	2	5	Kemendesa PDTT	
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis Provinsi Jambi	Berkebangwa Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perumahan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,51	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Desa Terpadu Provinsi Jambi	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	60,06	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batang III Ulu	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batang III Ulu	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi (Poin IPKP)	5	48,86	Kemendesa PDTT, Kemendagri	
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi (IPKP)	5	32,00	Kemendesa PDTT	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sumatera Selatan						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,01		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuwangi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuwangi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuwangi (Poin IKKP)	5	51,86		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Pop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Partikamburum, Telang, dan Kalam	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Partikamburum, Telang, dan Kalam	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan (IKKI)	5	57,08		Kemendesa PDTT
Pop : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 18,3 - 18,8; 2) 65,6 - 66,1		Kemendesa PDTT
Provinsi Bengkulu						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	56,68		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah (Poin IKKP)	5	53,62		Kemendesa PDTT
Pop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagia	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagia	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu (IKKI)	5	69,36		Kemendesa PDTT
Provinsi Lampung						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	62,31		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang (Poin IKKP)	5	50,30		Kemendesa PDTT
Pop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung (IKKI)	5	52,94		Kemendesa PDTT
Pop : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 14,0 - 14,5; 2) 65,2 - 65,7		Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemendesa
Kepulauan Bangka Belitung						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	70,26		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung Timur, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung Timur, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung Timur, dan Bangka Selatan (Poin IKKI)	5	50,13		Kemendesa PDTT

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Barupang	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Barupang	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung (IPKN)	5	68,60		Kemendes PDTT
Kepulauan Riau	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (ipdn) Indeks Desa	2	59,95		Kemendes PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Binaan dan Kerimau	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Binaan dan Kerimau	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Kerimau (Ipkn IPKP)	5	71,55		Kemendes PDTT
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbaikan yang dipandang kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kepulauan Riau (kecamatan)	2	17		Kemendes PDTT, Kemendagri
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kanan	Berkenbangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kanan	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Kanan	5	0,45		KemKP, Kemendes PDTT
KP : Kelengkapan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,08		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi (%)	4	0,383		
		Jumlah daerah dengan penertarikan daerah meningkat (daerah)	4	105		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	61		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	13286		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	28		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	61		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kespakartan dan Perjujukan Kerja Sama Daerah (daerah)	4	2		
		Persentase capaian SPN di daerah (%)	4	0,74734		
		Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	2		
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan kemelengarannya pematan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigrasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	838.292,5 ha (1.676.585 bidang)		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DURUNGKAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA																																																				
Provinsi Aceh	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri																																																				
							Prop : Penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan Ruang	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	82.284 107.924	Kemren ATR/BPN																																														
													Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	14.747																																										
																		Prop : Penyelenggaraan Pemetaan Ruang	Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1	Kemren ATR/BPN																																			
																								Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																															
																													Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																										
																																		Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																					
																																							Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																
																																												Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1											
																																																	Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1						
																																																						Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1	
Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																																																							
					Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																																																		
										Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peningkatan Kembali/Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	1																																													

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sumatera Utara						
Pop 2: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Tertatasannya Persebaran Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampungan Persebaran Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persebaran Substansi)	2	2		
Provinsi Sumatera Barat						
Pop 2: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kerangka baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop 2: Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Tertwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertanahan	Jumlah sertifikasi Hak Atas Tanah (bidang)	5	83.583		Kemtan ATR/BPN
Pop 2: Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tertwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	50.000		Kemtan ATR/BPN
	Tertwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	135.809		
	Tertwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	73.097		
	Tertusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan Kemitra/Perencanaan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (materi teknis dan koperta RTRW)	2	2		Kemtan ATR/BPN
	Tertusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RD/RT Kawasan (KI/KEK/KSPN/KRPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RD/RT (materi teknis dan koperta RD/RT)	2	1		
	Tertusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan KDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KDTR (materi teknis dan koperta KDTR)	2	5		
	Tertatasannya Persebaran Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampungan Persebaran Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persebaran Substansi)	2	6		
Provinsi Sumatera Barat						
Pop 2: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kerangka baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop 2: Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Tertwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikasi Hak Atas Tanah (bidang)	5	52.655		Kemtan ATR/BPN
	Tertwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	151.012		
	Tertwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.390		
Pop 2: Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tertusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan KDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KDTR (materi teknis dan koperta KDTR)	2	5		Kemtan ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
Provinsi Riau	Terlaksananya Persewaan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampungan Persewaan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persewaan Substansi)	2	3			
		Jumlah pelaksanaan dan pendampungan Persewaan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (persewaan Substansi)	2	4			
	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kategori baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri	
		Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	314.267		Kemend ATR/BPN	
	Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000			
		Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	188.159			
	Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	716		
			Jumlah Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemend ATR/BPN
		Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
			Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
Provinsi Kepulauan Riau							
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kategori baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri	
		Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.289		Kemend ATR/BPN	
Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	2.500			
		Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	33.367			
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	2.805			
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemend ATR/BPN	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Jambi	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDUK Kawasan Tembak Arahian Prioritas Nasional (K/ KSK/ KSN/ KTN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDUK)	2	1	Kemendagri	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDUK	2	4		
		Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	2	1		
	Prop : Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat daerah	Peringatan pematan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
		Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertanahan	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang) Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	311.137 25.000	
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	228.945	
	Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	4.400	Kemendagri/ BPN
		Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4	
Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTR/ RDUK Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR/ RDUK Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	16		
Provinsi Sumatera Selatan						
Pop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat daerah	Peringatan pematan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan	4	8	Kemendagri	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA	
Prop : Pengelolaan dan peyeyanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	kinerja baik (Tugas dan wewenang)	5	568.701		Kemren ATR/BPN	
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000			
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	317.102			
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	15.235			
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1		Kemren ATR/BPN	
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5			
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	2	1			
Provinsi Lampung	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah daerah dan hubungan pusat-daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri	
		Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	165.901		Kemren ATR/BPN
Prop : Pengelolaan dan peyeyanan pertanahan	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	63.703			
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	16.500		
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1		Kemren ATR/BPN
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Anah Prioritas Nasional (KI/KEK/SSRN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
		Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Bengkulu						
Pop ¹ : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan membangun pusat-daerah	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		Kemendagri
Pop ² : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan membangun pusat-daerah	Peringatan peraturan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop ³ : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.870		Kemen ATR/BPN
Pop ⁴ : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	17.143		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	6.603		Kemen ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/ Dinas Penyusunan RDTR KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Keputusan RDTR)	2	5		Kemen ATR/BPN
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	1		Kemen ATR/BPN
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
Pop ¹ : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan membangun pusat-daerah	Peringatan peraturan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop ² : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	44.898		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	53.070		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.215		Kemen ATR/BPN
Pop ³ : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/ Dinas Penyusunan kemah/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Keputusan KTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PM/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (POP))	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyelenggaraan RDI/TK Kawasan (KI/KEK/ASPN/KITPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDI/TK (Materi Teknis dan Keperda RDI/TK)	2	1		Kemendagri/BPN
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDI/TK (Materi Teknis dan Keperda RDI/TK)	2	4		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Penyelenggaraan Substansi Teknis RRTK/RDI/TK Kabupaten/Kota (Preselenggaraan Substansi)	2	4		
PP : Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (peresen/tahun) IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (min-maks) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	5 5 5	4,8 – 8,5 72,7-82,5 7,9		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi) -Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi) -KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	5 5 5	2 3 2		
Provinsi DKI Jakarta						
Provinsi Jawa Barat						
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Ungung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ungung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri
Provinsi Jawa Tengah						
Prop : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah (nilai)	5	>1		Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Selatarnya	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Selatarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah (nilai)	5	>1		Kemendikbud, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi DI Yogyakarta	Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Selatarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi Jawa Timur	Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Selatarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi Banten	Prop : Percepatan Peninjauan Investasi KEK Tanjung Lesung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi Bali	Prop : Peningkatan keberlanjutan DPP Keretasisasi Bali	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkenbangnya Sektor Unggulan	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi DKI Jakarta	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DKI Jakarta (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Provinsi Jawa Barat	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (%)	5	>1		Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	Prop : Pengembangan komoditas unggulan Kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan Kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemertan	
	Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemen ESDM	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemen KP	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemen KP	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5		Kemen KP	
	Provinsi Jawa Tengah						
	Prop : Peningkatan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5		Kemertan	
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5		Kemertan	
	Prop : Peningkatan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5		Kemen KP	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5		Kemen KP		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5		Kemen KP		
Provinsi DI Yogyakarta							
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta (%)	5		Kemen KP		
Provinsi Jawa Timur							
Prop : Peningkatan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemertan		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemen KP		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5		Kemen KP
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5		Kementerian
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5		Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perikanan Berkebangaya Kawasan Perikanan						
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mngelung (Angka perhitungan sementara) Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (Angka perhitungan sementara)	5	59		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi DKI Jakarta Pop : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (Angka perhitungan sementara)	5	44,41		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (Angka perhitungan sementara)	5	46,08		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (Angka perhitungan sementara)	5	75,08		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (Angka perhitungan sementara)	5	42,34		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (Angka perhitungan sementara)	5	50,19		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (Angka perhitungan sementara)	5	44,68		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (Angka perhitungan sementara)	5	45,56		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (Angka perhitungan sementara)	5	43,65		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (Angka perhitungan sementara)	5	46,63		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Majalengka (Angka perhitungan sementara)	5	29,9		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cillegan (Angka perhitungan sementara)	5	61,94		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (Angka perhitungan sementara)	5	54,15		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Demasar (Angka perhitungan sementara)	5	66,56		
		Meningkatnya kualitas WM di Jawa	5	4		
		Berembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/ PKW	5	14		
		Terbangunnya Kota Baru	5	1		
		Berembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	5	1		
Provinsi DKI Jakarta Pop : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemendagri, Kemen ESDM.

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Jawa Barat	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	5	11,45 - 11,85		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	61,60		
		Persentase pelayanan publik yang berhasil dipublikasikan (%)	5	75		
Provinsi Jawa Tengah	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	69,46		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Subabumi (Poin IPKP)	5	47,18		
		Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	68,33		
Provinsi DI Yogyakarta	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Magelang dan Kendal (Poin IPKP)	5	55,97		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	77,03		
		Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	67,27		
Provinsi Jawa Timur	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pamekasan dan Banyuwangi (Poin IPKP)	5	72,26		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	63,29		
		Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pandelegang (Poin IPKP)	5	64,41		
Provinsi Banten	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	75		ENPB
		Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandelegang	5	75		
		Persentase pelayanan publik yang berhasil dipublikasikan (%)	5	75		
Provinsi Bali	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	74,08		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Buleleng dan Klungkung (Poin IPKP)	5	68,20		
		Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (goin Indeks Desa)	2	74,08		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
KP : Kembangkan dan Keuangan Daerah	Terdaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,36				
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi Tinggi (%)	4	0,62				
		Jumlah daerah dengan penertamaan daerah meningkat (daerah)	4	90				
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	47				
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (zari)	4	8585,5				
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	16				
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	47				
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Pejujukan Kerja Sama Daerah (daerah)	4	2				
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,788971429				
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	4				
		Mengingatnya pelayanan pertanian dan kesetrukkannya pertanian ruang		Luas cakupan bidang tanah berstatus yang terdigi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	2.333.978 ha (4.607.950 bidang)		
				Luas cakupan peta dasar pertanian (ha)	5	1.559.750		
				Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanian yang menerapkan pelayanan pertanian modern berbasis digital (satker)	5	82		
				Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapakan batas (km)	5	2.422		
				Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	5	1		
		Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi pada aspek pelayanan pertanian cetak tanah adat/ibayat (provinsi)	5	33				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
Provisi DKI Jakarta Pop? Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan dukungan pusat-daerah								
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata		Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		
				Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	9		
				Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
				Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	28		
				Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1300%		
				Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Substansi Teknis RTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	35		
				Jumlah Gelar Perken Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	2		
				Tercapainya Jumlah Kecepatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan (Kecepatan teknis)	3	3.059		
				Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km2)	2	11.300		
				Tersusunnya Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km2)	2	28.132		
				Terlaksananya Layanan Data Center (Baru)	2	360		
				Terbangunnya Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia (Tembaye)	2	600		
			Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	Persentase perizinan yang kemungkinannya sudah dididagaskan ke RPS/Prima berbasis elektronik (%)	4	1		Kemendagri
	Meningkatnya kerja sama daerah	Jumlah Daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama (daerah)	4	12				
	Meningkatnya persentase pencapaian SPM di Daerah	Persentase pencapaian SPM di Daerah (%)	4	0,7428				
	Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi (%)	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,18				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DURUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat (daerah)	4	359		Kemendagri/BPN
	Meningkatnya kualitas belanja daerah	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	210		
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	210		
	Peningkatan perhatian hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah khususnya di bidang pertanahan	Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khususnya di bidang pertanahan (regulasi)	4	5		
	Tercapainya sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (didang)	5	51.530		
	Terdapatnya peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	1.559.750		
	Terdapatnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pertanahan yang modern	Jumlah Layanan Data dan Informasi (satker)	5	82		
	Terdapatnya pemetaan dan perpipaan basis kawasan hutan dan non hutan	Papaya Basis Kawasan Hutan dengan ATR dalam skala nasional (km)	5	2.422		
	Terdapatnya operasional kefarmasian Bank Tanah	Jumlah Lembaga Bank Tanah (lembaga)	5	1		
Terdapatnya sosialisasi dan penutusiasan tanah adat/ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (satker)	5	33			
Terdapatnya percepatan pemenuhan proporsi SDM Ideal (PNS Juru Ukur Bidang Pertanahan) dalam mendukung pencapaian target sichei positif	Jumlah PNS Juru Ukur Pertanahan (orang)	5	1.500			
Terdapatnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	280			
Terdapatnya data lokasi indikator pengadaaan tanah (satker)	Jumlah Data lokasi indikator pengadaaan tanah (satker)	5	495			
Terdapatnya basis data pengadaaan tanah	Jumlah basis data pengadaaan tanah (satker)	5	66			
Terdapatnya percepatan peta Zona Nilai Tanah	Luas Peta Zona Nilai Tanah (ha)	5	3.951.110			
Terdapatnya percepatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Luas Peta Tematik (ha)	5	2.115.396			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Jawa Barat	Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
		Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.527.096	
	Prop : Pengolahan dan pelayanan perikanan	Terwujudnya peta bidang tanah dan tumpang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	629.981	Kemren ATR/BPN
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	42.069	
	Prop : Penyelenggaraan Praktek Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2	Kemren ATR/BPN
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	7	
	Prop : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Terlaksananya Reresetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Reresetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Reresetujuan Substansi)	2	5	BIG
			Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	
		Tercapainya jumlah Keesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah keesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Keesepakatan teknis)	3	767	
		Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diaktualisasi (km2)	2	11.300	
Tersusunnya Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000		Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km2)	2	28.132		
Terlaksananya Layanan Data Center		Jumlah hari layanan data center beroperasi (Hari)	2	360		
Provinsi Jawa Tengah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Terbangunnya Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia	Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (Terabyte)	2	600	Kemendagri
		Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.516.966		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	706.084		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	145.235		Kemren ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyesunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Keperda KTRW)	2	2		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyesunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Keperda RDTR)	2	6		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kecamatan yang dihasilkan (kecepatan teknis)	3	771		
Prop : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercepatnya jumlah Kespakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kecamatan yang dihasilkan (kecepatan teknis)	3	771		BIG
Provinsi DI Yogyakarta						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan perhatian hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerjanya baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	62.038		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	20.371		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	26.510		Kemren ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyesunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Keperda KTRW)	2	2		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	2		
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
Provinsi Jawa Timur						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan perhatian hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerjanya baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PM/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (Pop))	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA				
Prop : Penggalian dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.338.588	Kemendagri	Kemen ATR/BPN				
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	512.197						
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	46.245						
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah Raperpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1	Kemendagri	Kemen ATR/BPN				
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1						
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RD/RT Kawasman Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RD/RT (Materi Teknis dan Raperda RD/RT)	2	1						
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RD/RT	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RD/RT (Materi Teknis dan Raperda RD/RT)	2	5						
	Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RTRW/ RD/RT Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW/ RD/RT Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	2	7						
	Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RRT/ RD/RT Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRT/ RD/RT Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	2	15						
	Tercepatnya jumlah Kecepatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan	Jumlah kecepatan teknis batas wilayah administrasi yang dihasilkan (Kecepatan teknis)	3	778			BIG			
	Provinsi Banten	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah daerah dan hubungan pusat-daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4			8	Kemendagri		
				Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang			Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)		5	167.010
				Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang			Jumlah Bidang Tanah (bidang)		5	100.974
Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4				Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	10.450				
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1	Kemendagri	Kemen ATR/BPN				
			Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RD/RT	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RD/RT (Materi Teknis dan Raperda RD/RT)			2	5		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
Provinsi Bali	Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peringatan peringatan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan benerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri	
		Prop : Pengolahan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	9.758	Kemran ATR/BPN
			Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	2.687	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	10	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	10	
			Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5	
PP : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (permen/ tahun)	5	3,5 - 5,2			
		IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (min-maks) Tenggara (%)	5	66,3-69,5 17,8			
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/ KLI/ DZF/ kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (indikator diteliti/ setiap tahun)	5	>1			
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang diinisiasi dan dikembangkan	5	3			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Nusa Tenggara Barat Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	Tertaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (tabel)	5	> 1		Kemen PUPR, Kemparekrak, Kementag
Provinsi Nusa Tenggara Timur Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Tertaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (tabel)	5	> 1		Kemparekrak, Kemen PUPR, Kementub, Kementag
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemertan
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan tembakau	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan tembakau	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan geman	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan geman	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan garam	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5		Kemertan
	Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5		Kemertan
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (angka perhitungan sementara)	5	44,34		Kemertan
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (angka perhitungan sementara)	5	43,91		Kemertan
Prioritas Nias Tenggara Bant	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKV/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKV/PKW (kota)	5	1		Kemertan
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKV/PKW (kota)	5	1		Kemertan
Prioritas Nias Tenggara Timur	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKV/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKV/PKW (kota)	5	1		Kemertan
		Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berencana dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	56,42		Kemertan
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	19,15 - 19,55		Kemertan
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	51,18		Kemertan
		Rata-rata Nilai Indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diwawatkan di Kepulauan Nias Tenggara (IPKT)	5	47,67		Kemertan
		Jumlah kecamatan lokal prioritas perbaikan jalan yang ditugaskan kepelatihan dan data kelolaannya di Kepulauan Nias Tenggara (kecamatan)	5	38		Kemertan
		Rata-rata nilai Indeks Pengalokasian Kawasan Pembangunan PRSN di Kepulauan Nias Tenggara (IPKP)	5	0,45		Kemertan
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	19,15 - 19,55		Kemertan
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	51,18		Kemertan
		Rata-rata Nilai Indeks perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diwawatkan di Kepulauan Nias Tenggara (IPKT)	5	47,67		Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DURUNGKAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	68,45		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu (Poin IKPD)	5	53,08		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	56,13		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 25,7 - 26,2 2) 66,7 - 67,2		Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas
Prop : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	Terpuhlikannya pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipublikasikan (%)	5	75		BNPR, Kemendagri, Kemendikbud
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	51,74		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur (Poin IKPD)	5	49,27		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Poni, dan Melolo	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Poni, dan Melolo	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (IKPD)	5	42,03		Kemendesa PDTT, Kemendagri, Kemendikbud
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di	Meningkatnya kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbaikan reguler yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata	2	4		Kemendesa PDTT

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Nias Tenggara Barat	Pop 1: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kerangka baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
		Pop 2: Pengelolahan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	55.651
	Pop 3: Penyelenggaraan Peantakan Ruang		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan Bidang Tanah	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	52.072
		Pop 4: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah	Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang Tanah Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	6.920
	Pop 5: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah		Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RTRW Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	3
		Pop 6: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah	Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang Tanah dan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	3
	Pop 7: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah		Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang Tanah dan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2
		Pop 8: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah	Terwujudnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang Tanah dan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2
	Pop 9: Peningkatan Pemukiman dan Rencana Pembangunan Daerah		Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan	4	8

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengelolaan dan peyeyanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertanahan	kinerja baik (Tugas dan wewenang)	5	102.359		Kemren ATR/BPN
		Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang) luas per dasar pertanahan (ha)	5	40.000		
		Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	67.645		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	11.550		Kemren ATR/BPN
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RD/DR (Materi Teknis dan Raperda RD/DR)	2	3		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
		Jumlah pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (persen/tahun)	5	3,6 - 5,7		
PP : Pembangunan Wilayah Kalimantan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	IPI Provinsi Wilayah Kalimantan (mis-maks)	5	69.077,7		
		Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (%)	5	5,6		
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (mohon dilen glupl satu)	5	>1		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		4		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)		2		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan (jumlah KI)		2		
Provinsi Kalimantan Barat						
Pop : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Krepareng	Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Krepareng	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat (nilai)	5	>1		Kemren, Kemren PUPR, Kemhub, Kemendagri
Pop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Samudra-Singkarang	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Samudra-Singkarang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat (nilai)	5	>1		Kemren PUPR, Kemparatraf

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Tengah						
Prop : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	5	> 1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemempertih, Kemendagri
Provinsi Kalimantan Selatan						
Provinsi Kalimantan Timur						
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	5	> 1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemempertih
Provinsi Kalimantan Utara						
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Kalimantan Barat						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen KP
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan bauksit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan bauksit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemertan
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan perkebunan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kalimantan Selatan						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemertan
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan perkebunan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perkebunan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen ESDM
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kalimantan Timur						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan karet	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen KP

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemren ESDM
Provinsi Kalimantan Utara						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan Kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan Kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan Kakao	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan Kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemren KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemren KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas ungguluan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemren KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan					
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (angka perhitungan sementara)	5	45,12		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (angka perhitungan sementara)	5	39,54		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (angka perhitungan sementara)	5	46,65		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banjarmasin (angka perhitungan sementara)	5	38,12		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Nagara (angka perhitungan sementara)	5	38,54		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (angka perhitungan sementara)	5	50,88		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (angka perhitungan sementara)	5	47,36		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (angka perhitungan sementara)	5	37,02		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanakan (angka perhitungan sementara)	5	47,6		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/ PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kecil)	5	6		
	Tertaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		

PROGRAM PRIORITAS (PP/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (Pop))	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Barat	Berkenbangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		
		Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (Ia)	5	5.600		
Provinsi Kalimantan Tengah	Berkenbangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah Kota Baru yang dibangun (Kota)	5	1		
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PRW (kota)	5	2		Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Selatan	Berkenbangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PRW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PRW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
		Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemen BPS, Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Timur	Berkenbangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		
		Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (Ia)	5	5600		Kemenkeu, Kemen PAN dan RB, Kemen PPN/Bapenas, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, KLHK, Kemenhub, Kementerian, TNI AD, TNI AU, TNI AL, Mabes TNI
Provinsi Kalimantan Utara	Berkenbangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PRW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PRW (kota)	5	2		Kemen PUPR, Kemen ESDM
		Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terdapatnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PRW (kota)	5	1		
		Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkesbang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	55,76		
Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)			5	6,3 - 6,8		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Rata-rata nilai Indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	48,46		Kemendesa PDTT, Kemendagri
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Pulau Kalimantan (IPKT)	5	52,59		
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Kalimantan (kecamatan)	5	37		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Kalimantan (IPKT)	5	0,42		
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	52,66		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kabupaten Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kabupaten Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas (Poin IPKP)	5	40,79		Kemendesa PDTT, Kemendesa ESDM
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rantau Jaya, Ceribang Mas Perkas, dan Subah	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rantau Jaya, Ceribang Mas Perkas, dan Subah	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Provinsi Kalimantan Barat (IPKT)	5	57,86		Kemendesa PDTT, Kemendesa ATR/BPN
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kalimantan Barat (kecamatan)	2	2		Kemendesa PDTT
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Ayuk	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Ayuk	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Paloh Ayuk (IPKP)	5	0,45		Kemendesa PDTT, Kemendesa Kemendish, Kemendagri
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Bahang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Bahang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Jagoi Bahang (IPKP)	5	0,34		Kemendesa PDTT, Kemendesa ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	53,84		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Waringin Barat	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Waringin Barat	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Waringin Barat (Poin IPKP)	5	54,68		Kemendesa PDTT

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bekantan Raya, serta kawasan Transmigrasi Lamanit-Dandahup dan Pulang Pusu yang sudah tidak produktif pada era penguatan keberhasilan pangan nasional	Tertaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bekantan Raya, serta kawasan Transmigrasi Lamanit-Dandahup dan Pulang Pusu yang sudah tidak produktif pada era penguatan keberhasilan pangan nasional	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah (IPKT)	5	24,60		Kemendes PDTT
Provinsi Kalimantan Selatan						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Tertaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,25		Kemendes PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Tertaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar (poin PPG)	5	57,44		Kemendes PDTT
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Calaya Baru	Tertaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Calaya Baru	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan (IPKS)	5	64,57		Kemendes PDTT, Kemren ATR/BRN
Provinsi Kalimantan Timur						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Tertaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	58,66		Kemendes PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Tertaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur (poin IPKT)	5	50,63		Kemendes PDTT, Kemren ESDM
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Malay Kalimantan	Tertaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Malay Kalimantan	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur (IPKT)	5	53,96		Kemendes PDTT
Provinsi Kalimantan Utara						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Tertaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	48,86		Kemendes PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	Tertaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan (poin PPG)	5	47,73		Kemendes PDTT, Kemren ESDM
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Selan Batu dan Samarigata	Tertaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Selan Batu dan Samarigata	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	51,30		Kemendes PDTT, Kemren ATR/BRN
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatkan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbaikan regenerasi yang dirampungkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kalimantan Utara (kecamatan)	2	5		Kemendes PDTT
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,38		Kemendes PDTT, KKP, Kemren, Kemren ESDM
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,38		Kemendes PDTT, Kemren PUPR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Barat						
Pop1: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan membangun pusat-daerah	Peningkatan pemataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop2: Pengolahan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertanahan	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	176.937		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyelesaian peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	100.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	469.538		
Pop3: Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	14.740		Kemren ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Perencanaan Kembali/Perencanaan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Koperda KTRW)	2	1		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan KDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Koperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persejuaan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persejuaan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/ Kota (Persejuaan Substansi)	2	3		
Provinsi Kalimantan Tengah						
Pop1: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan membangun pusat daerah	Peningkatan pemataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Pop2: Pengolahan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertanahan	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	101.647		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyelesaian peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	232.676		
Pop3: Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	8.800		Kemren ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan KDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Koperda RDTR)	2	5		Kemren ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kareja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan tungg	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	60.966	Kemren ATR/BPN
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	322.636	Kemren ATR/BPN
Pop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	2	Kemren ATR/BPN
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5	Kemren ATR/BPN
		Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	3	Kemren ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah daerah dan hubungan pusat-daerah	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kareja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dasar pertanahan	Jumlah peta dasar Pertanahan (pa)	5	90.087	Kemren ATR/BPN
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan tungg	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	75.000	Kemren ATR/BPN
Pop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	157.108	Kemren ATR/BPN
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bidang/Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	784	Kemren ATR/BPN
		Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	2	Kemren ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Utara						
Prop : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	Tertaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara (talia)	5	>1		Kemen PUPR, Kemendagri
Prop : Percepatan Operasionalisasi KEK Likiepang/Destinas Pariwisata Prioritas Mamudo-Likiepang	Tertaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Likiepang/Destinas Pariwisata Prioritas Mamudo- Likiepang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara (talia)	5	>1		Kemendagri, Kemen PUPR, Kemendub, EKPM, Kememparekrif
Provinsi Sulawesi Tengah						
Prop : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	Tertaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah (talia)	5	>1		Kemempert, Kemendub, Kemendagri
Provinsi Sulawesi Selatan						
Prop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	Tertaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan (talia)	5	>1		Kemendub, Kememparekrif
Provinsi Sulawesi Tenggara						
Prop : Perubahan Aksesibilitas, Arsitek dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakabobi	Tertaksananya Perubahan Aksesibilitas, Arsitek dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakabobi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Sulawesi Tenggara (talia)	5	>1		Kemendub, Kememparekrif, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan						
Provinsi Sulawesi Utara						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tengah						
POP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemertan
Provinsi Sulawesi Selatan						
POP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemertan
Provinsi Sulawesi Tenggara						
POP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemertan
POP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Provinsi Gorontalo						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemertan
Provinsi Sulawesi Barat						
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemertan

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA	
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkebangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (angka perhitungan sementara)	5	46,94			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (angka perhitungan sementara)	5	44,09			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (angka perhitungan sementara)	5	41,39			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (angka perhitungan sementara)	5	47,01			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (angka perhitungan sementara)	5	40,5			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (angka perhitungan sementara)	5	44,61			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (angka perhitungan sementara)	5	39,1			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Manado (angka perhitungan sementara)	5	33,88			
		Berkebangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	6		
		Berkebangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		
Provinsi Sulawesi Utara							
Prop : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM	
	Berkebangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1			
Provinsi Sulawesi Tengah							
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkebangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM	
Provinsi Sulawesi Selatan							
Prop : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Berkebangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemendag, Kemhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM	
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkebangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen ESDM	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tenggara						
Pop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemren ESDM
Provinsi Gorontalo						
Pop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemren PU/PR, Kemren ESDM
Provinsi Sulawesi Barat						
Pop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemren PU/PR, Kemrenhub, Kemren ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Tumbuhnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkebang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	60,59		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	12,1 -12,45		
		Rate-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	51,20		
		Rate-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Pulau Sulawesi (IPKT)	5	54,87		
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negeri yang ditugaskan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Sulawesi (kecamatan)	5	18		
		Rate-rata nilai Indeks Pengalokasian Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sulawesi	5	0,44		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan secara sempurna dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
	Terpungkannya daerah terdampak bencana	Persentase poliyumaman publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Utara						
Prop : Pembangunan Desa Terpaku	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpaku	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	60,37		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Minahasa Utara (poin IKKP)	5	61,17		Kemendesa PDTT
Prop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbaikan negara yang diwujudkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Sulawesi Utara (kecamatan)	2	5		Kemendesa PDTT
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Tahuna (IKKP)	5	0,46		Kemendesa PDTT, Kemendhub
Prop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Madangane	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Madangane	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Madangane (IKKP)	5	0,42		Kemendesa PDTT, KKP
Provinsi Sulawesi Tengah						
Prop : Pembangunan Desa Terpaku	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpaku	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	58,01		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Bulo, dan Poso	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Bulo, dan Poso	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Morowali, Bulo, dan Poso (poin IKKP)	5	46,53		Kemendesa PDTT
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah (IPKT)	5	52,41		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
Prop : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 15,1 – 15,6; 2) 67,5 – 68,0		Kemendesa PDTT, KKP, Kemensos
Prop : Pemulihan Pesa Berencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	Terpuhlikannya pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipublikasi (%)	5	75		BNBR, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemendhub
Provinsi Sulawesi Selatan						
Prop : Pembangunan Desa Terpaku	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpaku	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	63,14		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone (poin IKKP)	5	51,23		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
Prop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Giliweng, Masamba, dan Mahalona	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Giliweng, Masamba, dan Mahalona	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan (IPKT)	5	51,56		Kemendesa PDTT

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tenggara						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	57,62		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kawasan Selatan, Wakatobi, dan Muna	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kawasan Selatan, Wakatobi, dan Muna	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Selatan, Wakatobi, dan Muna (poin IPKP)	5	45,85		Kemendesa PDTT
Prop : Realisasi Kawasan Transmigrasi Transiges, Muna, dan Asmara/Roula	Terlaksananya Realisasi Kawasan Transmigrasi Transiges, Muna, dan Asmara/Roula	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transiges yang Direalisasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara (IPKJ)	5	51,40		Kemendesa PDTT, Kemren ATR/BPN
Provinsi Gorontalo						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	63,48		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara (poin IPKP)	5	53,99		Kemendesa PDTT
Prop : Realisasi Kawasan Transmigrasi Sumala, Pajuyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubaha	Terlaksananya Realisasi Kawasan Transmigrasi Sumala, Pajuyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubaha	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direalisasikan di Provinsi Gorontalo (IPKJ)	5	59,02		Kemendesa PDTT
Provinsi Sulawesi Barat						
Prop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	57		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Prop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Mamuju dan Mamuju Tengah (poin IPKP)	5	45,61		Kemendesa PDTT
Prop : Realisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Serudu Baras	Terlaksananya Realisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Serudu Baras	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Barat (IPKJ)	5	64,09		Kemendesa PDTT, Kemren ATR/BPN
KP : Kesehatan dan Keuangan Daerah						
	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelengkapan dan kualitas sarana kesehatan bagi pemrintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,10		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi (%)	4	0,255		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah mendukung (daerah)	4	59		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	36		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Utara Pop 1. Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Meningkatkan polyanan pertanian dan kemelengarannya pemetaan ruang	Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	4867	
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	9	
			Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	36	
			Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Pejanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	5	
			Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,742116667	
			Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	2	
			Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdignasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	204.548,5 ha (409.097 bidang)	
			Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	150.000	
			Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1,00	
			Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	7,00	
			Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTTR (Materi Teknis dan Raperda RDTTR)	2	28,00	
			Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Perencanaan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Perencanaan Substansi)	2	9,00	
			Jumlah pelaksanaan dan pendampingan perijinan/bumihans atau SAKI RDTTR Kabupaten/Kota (Perencanaan Substansi)	2	6,00	
			Jumlah Gelar Perken Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1,00	
	Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kecurahan (Kesepakatan teknis)	3	1.275,00		
Provinsi Sulawesi Utara	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PM/KEGIATAN PRIORITAS (KP)/PROYEK PRIORITAS (Pop))	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengeloban dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	48.734		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	46.500		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	5.500		Kemren ATR/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	2		
	Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	2		
	Tercepatnya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan teknis)	3	443		
Provinsi Sulawesi Tengah						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	5	87.317		Kemren ATR/BPN
Prop : Pengeloban dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	100.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	126.999		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	11.911		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	1		Kemren ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Selatan						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Prop : Peningkatan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	127.721		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	50.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	129.075		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	53.295		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Perijinan Kembali/Perijinan RTWV Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Koperda RTRW)	2	2		
Prop : Peningkatan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Perijinan Kembali/Perijinan RTWV Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Koperda RTRW)	2	5		Kemren ATR/BPN
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW/RDTR Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	3		
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
Prop : Peningkatan Informasi Geospasial	Tercepatnya jumlah Keesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan teknis)	3	504		BKG
Provinsi Sulawesi Tenggara						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Prop : Peningkatan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	69.244		Kemren ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	102.143		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	15.620		

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1		Kemendagri/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Teraksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	1		
Prop : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Terapeunya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/ Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	328		BIG
Provinsi Gorontalo						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kantor baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
Prop : Pengelolaan dan pelekayan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	37.981		Kemendagri/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	27.723		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang Raperpres)	5	3.410		
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemendagri/BPN
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Teraksananya Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	1		
	Teraksananya Persetujuan Substansi Teknis KRTR/ RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis KRTR/ RDTR Kabupaten/ Kota (persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Sulawesi Barat						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kantor baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (budang)	5	38.100		Kemren ATR/BPN		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	23.759				
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	22.240				
Prop : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penajauan Kembali/ Penyusunan KTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	1		Kemren ATR/BPN		
PP : Pembangunan Wilayah Maluku	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDI/TR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDI/TR (Materi Teknis dan Raperda RDI/TR)	2	4				
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (pereseu/labuh)	5	5,2 - 6,2				
	KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkenbangnya Kawasan Strategis	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (tan-maki)	5	69,9-70,5			
			Perentase penduduk miskin wilayah Maluku (%)	5	12,8			
			Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1			
Provinsi Maluku Utara	Tertatasannya Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		3				
		Doneisasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)		1				
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan) -KI Prioritas dan KI pengembangan (jumlah KI)		1				
Prop : Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	Tertatasannya Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		Kemren PUPR, Kemperkeramf, Kemendagri		
Prop : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Tertatasannya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Maluku Utara (nilai)	5	>1				
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkenbangnya Sektor Unggulan	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5					Kemren PUPR, Kemhub, Kemendagri
Provinsi Malaka	Tertatasannya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Tertatasannya pengembangan komoditas unggulan kelapa	5			Kemren		
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh								
Prop : Pengembangan komoditas unggulan kelapa							Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Malaka (%)	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap Prop : Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kemren KP	
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kemren KP	
Provinsi Maluku Utara							
Prop : Pengembangan komoditas unggulan Kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan Kelapa	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemertan	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemren KP	
Prop : Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemren KP	
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (Angka perhitungan sementara)	5	62,27			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (Angka perhitungan sementara)	5	44,3			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (Angka perhitungan sementara)	5	44,7			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Soifi (Angka perhitungan sementara)	5	37,91			
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang ditembakkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3			
		Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1			
Provinsi Maluku							
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang ditembakkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemren ESDM	
Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang ditembakkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemren ESDM	
Prop : Pembangunan Kota Baru	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemren PUPR	
Provinsi Maluku Utara							
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	51,74			
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	15,75 - 16,00			

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Rata-rata nilai Indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP) Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Kepulauan Maluku (IPKT)	5	54,35	
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Maluku (kecamatan)	5	32,42		
		Rata-rata nilai Indeks Pengabdian Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Maluku (IPKP)	5	34		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	0,47		
				Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
Provinsi Maluku						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	50		Kemendes PDTT, Kemendagri
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Maluku Tengah (poin IPKV)	5	50,00		Kemendes PDTT
Pop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kohorsora	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kohorsora	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Provinsi Maluku	5	40,51		Kemendes PDTT, Kemend ATR/BPN
Pop : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Memingkatnya kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Maluku (kecamatan)	2	4		-
Pop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Rata-rata nilai Indeks Pengabdian Kawasan Perbatasan PKSN Saumlaki (IPKP)	5	0,45		Kemend KP
Pop : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	Memingkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (p) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 22,2 - 22,7; 2) 64,6 - 65,1		Kemendes PDTT, Kemensos, KKP, Kemend PUPR
Provinsi Maluku Utara						
Pop : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	52		Kemendes PDTT, Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Pop : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pulau Morotai	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Morotai (Ipkm PKP)	5	58,70		Kemendes PDTT
Pop : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara (IPKT)	5	28,38		Kemendes PDTT, Kemendagri/BPN
Pop : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	Berkenbangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Daruba (IPK)	5	0,48		Kemendes PDTT, Kemendagri/BPN
Pop : Porogapan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 6,9 - 7,4; 2) 62,9 - 63,4		Kemendes PDTT, Kemensos, Kemendagri, KUKM
KP : Pengembangan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PEPD)	4	2,89		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi (%)	4	18		
		Jumlah daerah dengan penertimaan daerah meningkat (daerah)	4	16		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	10		
		Jumlah perizinan yang kesemuanya sudah didolegalkan ke PTSP Prima berbasis elektronik (lat)	4	1283,9		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Pejujangan Kerja Sama Daerah (daerah)	4	72		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	10		
		Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	1		
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan kemelengarannya pematan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigrasi dan memiliki georeferensi yang baik (lat)	5	34.215,5 ha (68.431 bidang)		
	Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan kemelengarannya pematan ruang	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda, RTRW)	2	4		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
Provinsi Maluku	Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerjanya baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri	
		Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.336	Kemendagri	
	Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	44.809	Kemendagri	
		Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	5.642	Kemendagri	
	Prop : Penyelenggaraan Pemetaan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2	Kemendagri	
		Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3	Kemendagri	
		Terlaksananya Peretujuan Substansi Teknis RRTR/ RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan dan penyiapan Peretujuan Substansi Teknis RRTR/ RDTR Kabupaten/ Kota (Peretujuan Substansi)	2	7	Kemendagri	
	Provinsi Maluku Utara	Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerjanya baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri
			Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	42.095	Kemendagri
		Prop : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	26.092	Kemendagri
Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)		5	1.487	Kemendagri		
Prop : Penyelenggaraan Pemetaan Ruang	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2	Kemendagri		
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2	Kemendagri		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
	Terusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTIR Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTIR (Materi Teknis dan Raperda RDTIR)	2	3		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (persetujuan Substansi)	2	2		
PP : Pengembangan Wilayah Papua	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat keesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (persen/tahun)	5	2,6 – 5,8		
		IPM Provinsi di Wilayah Papua (miliar-anak)	5	61,1-65,4		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	5	25,5		
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan (kawasan)		2		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)		1		
Provinsi Papua	Provinsi Papua Barat	-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)		1		
Provinsi Papua	Pop : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Blok-Tekuk Cenderawasih	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua (nilai)	5	>1		Kemren PUPR, Kemrenparekrif
		Provinsi Papua Barat				
Provinsi Papua	Pop : Perbaikan Aksesibilitas, Arakasi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (REK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua Barat (nilai)	5	>1		Kemren PUPR, Kemendag, Kemrenbit, Kemrenparakraf, Kemendag1
		KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	5		
Provinsi Papua	Pop : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	5	5		Kemrenan
		Pop : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	5	5	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren ESDM
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren ESDM
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren ESDM
Prop : Optimalisasi komoditas unggulan Tambaga	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan tambaga	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren ESDM
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
Prop : Pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Tertaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren ESDM
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
		Perentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemren KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/ PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	
Provinsi Papua	Prop : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	Kemren PUPR, Kemren ESDM
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/ PKW (kota)	5		1	Kemren PUPR, Kemren ESDM
Provinsi Papua Barat	Prop : Pembangunan Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5		1	Kemren ESDM, Kemrenhub
		Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5		1	Kemren ESDM, Kemrenhub
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Berembangnya Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5		33,14	
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5		34,45 - 34,75	
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Berembangnya Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (Poin IKIP)	5		39,62	
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (Poin IKIP)	5		39,62	

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DURUNGKAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Papua	Meningkatnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Diverifikasi di Pulau Papua (IPKTI)	5	34,59	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, akan tetapi pada tahun 2019 (sesuai PP No.78 Tahun 2014)	Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, Kemenhan, Kempertern, Kemakes, Kemen UKR, Kemaritub, Kemen ESDM
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Papua (kecamatan)	5	39		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Papua	5	0,49		
Provinsi Papua	Meningkatnya IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	Rata-rata IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	5	48,40		Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, Kemenhan, Kempertern, Kemakes, Kemen UKR, Kemaritub, Kemen ESDM
Prov : Wilayah Adat Papua : Mee Pago	Meningkatnya IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	Rata-rata IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai, Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	5	59,30		Kemendesa PDTT, KKR, Kemenhan, Kemaritub, Kemen FUPR, Kemen ESDM
Prov : Wilayah Adat Papua : Saierri	Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numor, Supiori	Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numor, Supiori	5	68,10		KKR, Kemen PUPR, Kemen ESDM
Prov : Wilayah Adat Papua : Tali	Meningkatnya IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	Rata-rata IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	5	67,60		Kemendesa PDTT, Kemenhan, Kemen PUPR, Kemaritub, Kemen ESDM
Prov : Wilayah Adat Papua : Annm Ha	Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	5	61,00		Kemendesa PDTT, Kemenhan, Kemen PUPR, Kemaritub, Kemen ESDM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	16		
		Jumlah perizinan yang kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	979		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	-		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Pejujukan Kerja Sama Daerah (daerah)	4	0,66675		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	16		
		Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4			
		Luas cakupan bidang tanah bersertifikat yang terdigratis dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	38.971		
		Luas cakupan peta dasar pertahanan (ha)	5	5.000		
		Jumlah Raperpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	3		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Subtansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Subtansi)	2	1		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Peretujuan Subtansi Teknis RTRW/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Subtansi)	2	7		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Papua						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri	Kemendagri
		Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	8.179		
Prop : Peningkatan dan pelayanan pertambangan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah pertambangan	Luas peta dasar pertambangan (ha)	5	5.000	Kemren ATR/BPN	Kemren ATR/BPN
		Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	22.179		
		Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	4.950		
		Jumlah Rerapras RDTK Kawasan Perubahan Negara (Materi Teknis dan Raperdas)	2	1		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda KTRW (Materi Teknis dan Raperda KTRW)	2	2		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persejuaan Substansi Teknis KTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persejuaan Substansi)	2	1		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persejuaan Substansi Teknis RDTR Kabupaten/Kota (Persejuaan Substansi)	2	6		
Provinsi Papua Barat						
Prop : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan pemetaan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8	Kemendagri	Kemendagri
		Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	30.792		
Prop : Pengelolaaan dan pelayanan pertambangan	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan Ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	37.772	Kemren ATR/BPN	Kemren ATR/BPN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. Juta)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penyelenggaraan Pranaam Ruang	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.797	Kemren ATR/BPN
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
		Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1	
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendirian proyek:						
Dukungan pengembangan kewilayahan						

Keterangan:

- Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
- 1) Pembangunan SDM
 - 2) Pembangunan Infrastruktur
 - 3) Peningkatan Kualitas
 - 4) Peningkatan Birokrasi
 - 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendataan THIS, sebuah proyek dapat menduduki lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (Pop) dan Proyek K4 masih dalam proses pendalaman dan pendataan di berbagai lokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Prilataza Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPRU-AP. Penulisan angka, identifikasi dan integrasi antartahapan, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing PP : Perindungan Sosial Dan Taka Kelola Kependudukan		Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan mengaktifnya sistem pemutakhiran data kependudukan	4	70	257.316.816,0	
				40		
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan		Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	4	1		
				95		
Prop : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan		Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	4	1.028		Kemendagri
				50		
Prop : Percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus		Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	4	50		Kemendagri
				1		
KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan		Meningkatnya integrasi data administrasi kependudukan	4	2.500		Kemendagri
				1		
Prop : Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu		Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	4	1		Kemendagri, BPS, BKKBN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Penguatan dan Layanan Terpadu	Terkasukannya Pendampingan dan Layanan Terpadu	Presentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu pemanfaatan kemiskinan (%)	4	70		
		Presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu pemanfaatan kemiskinan (%)	4	60		
		Presentase Provinsi/kab/ kota yang memantapkan sistem perencanaan, penganggaran dan money unit terpadu dalam proses penyusunan program-program pemanfaatan kemiskinan (%)	4	40		
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT (Kabupaten/Kota)	4	300		
		Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya (orang)	1	40.201		
		Indeks kepuasan terhadap isu Kependudukan (tahu)	4	52		
		Presentase Pemerintah Daerah yang menggunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (%)	4	45		EKKN
		Presentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang telah mendapatkan pengetahuan/pengalaman kependudukan (%)	4	90		EKKN
		Presentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/ Kota yang melaksanakan dan memantapkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (%)	4	25		EKKN
		Presentase cakupan ketersediaan layanan kesehatan nasional (JKP)(%)	4	85		
PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	Meningkatnya pemantauan data dan informasi kependudukan	Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	1	14,7		
		Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	1	11		
		Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip Kabupaten/Kota Inklusif (%)	4	5		
		Presentase cakupan ketersediaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	1	33,88		
		Pekerja formal (%)	1	29,44		
		Pekerja informal (%)	1	4,44		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Sistem jaminan sosial nasional	Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	Jumlah dokumen rancangan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional (dokumen)	1	1		
Prop : Pengembangan program jaminan sosial	Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	Jumlah dokumen kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Perawatan Standar (dokumen)	1	1		Kemendes
Prop : Penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	Terwujudnya penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	Jumlah kajian atau naskah akademik harmonisasi peraturan perundangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengalokasian aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS (dokumen kajian atau naskah akademik)	1	1		Kemendko PMK
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Tersalurkannya bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan (Keluarga Penerima Manfaat)	1	10.000.000		
		Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah (Keluarga Penerima Manfaat)	5	15.600.000		
		Penyaluran Bantuan LPG 3 KG (Keluarga Penerima Manfaat)	5	31.400.000		
		Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA (Keluarga Penerima Manfaat)	2	31.400.000		
Prop : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Terselenggaranya Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran (Keluarga Penerima Manfaat)	4	15.600.000		Kemensos
KP : Perlindungan sosial adaptif	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (jwa)	1	578.500		
Prop : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terlaksananya bantuan sosial untuk perlindungan korban bencana	Penduduk terdampak bencana yang memperoleh bantuan sosial (jwa)	1	284.500		Kemensos
KP : Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	Presentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (%)	1	21.70		
		Presentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (%)	1	16,62		
Prop : Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan sosial tingkat lanjut (jwa)	1	140		Kemensos, BRKKN
Prop : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)	Terlaksananya Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (Long-term Care)	Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jwa)	1	59,5		EKKN, Kemensos
Prop : Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya	Terwujudnya penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya	Jumlah penduduk rentan yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (jwa)	1	367.500		Kemensos

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan sebesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) [per 1.000 kelahiran hidup]	1	19,5		
		Angka kematian neonatal [per 1.000 kelahiran hidup]	1	12,2		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	1	62,16		
		Persentase kebutuhan bar-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	1	8,3		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) [kelahiran hidup per 1000 perempuan]	1	24		
		Prevalensi waiting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	1	7,8		
		Insidensi HIV [per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV]	1	0,21		
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	1	345		
		Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	1	280		
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	1	78		
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	1	80		
		Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	1	90		
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	1	89		
		Persentase obat memenuhi syarat (%)	1	83,6		
		Persentase makanan memenuhi syarat (%)	1	80		
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KIB), dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KIB), dan kesehatan reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan (kabupaten/kota)	1	431		
		Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	1	25,93		
ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Terwujudnya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	1	89		Kemendes, BRKBN
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (%)	1	100		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi Masyarakat Tertumbuhnya percepatan perbaikan gizi Masyarakat	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Dpop out/DO) (%)	1	24,5		Kemendes, BKKBN
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif (%) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1 1	45 14,5		
Prop : Penurunan Stunting	Tumbuhnya penurunan stunting	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi (%)	1	70		Kemendagri, Kemendes, Kemen KP, Kemen PPPA, BPOM, BKKBN
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV/AIDS yang menjalani Tempi ARV (ODHA on ART) (%)	1	45		Kemendes
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate) (%)	1	90		
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan (%)	2	100		
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	1	416		
		Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi (kabupaten/kota)	1	80		
		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini kasus penyakit Tidak Menular (TJM) (kabupaten/kota)	1	52		
		Jumlah kabupaten/kota yang menempatkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)	1	324		
		Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV (%)	1	80		
		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage) (%)	1	85		
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk (kabupaten/kota)	1	475		
Prop : Pengendalian Penyakit Menular	Terkendalinya penyakit menular	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko (%)	1	90		Kemendes
		Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (%)	1	88		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terkendalinya penyakit tidak menular	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrobiana $\geq 1\%$ (kabupaten/kota)	1	190		
		Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi (desa)	1	15		
Prop : Pengembangan Penyakit Tidak Menular	Terkendalinya penyakit tidak menular	Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di $\geq 80\%$ Puskesmas (kabupaten/kota)	1	205		Kemendes, BROM
		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM $\geq 80\%$ (kabupaten/kota)	1	129		
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germeas)	Terlaksananya Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germeas)	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan Germeas (%)	4	35		
Prop : Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/keurahan dengan Stop Bangun air besar, Sembaringan (SBS) (%)	1	50		Kemendes, BROM
Prop : Penguatan Promosi Germeas	Terlaksananya Penguatan Promosi Germeas	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif (%)	4	35		Kemendes, Kemendik
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Mengurangi Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	2	0		
		Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (%)	2	75		
		Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan (%)	4	35		
		Persentase Puskesmas dengan obat esensial (%)	1	90		
		Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (%)	2	85		
		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (%)	2	83		
		Persentase alat kesehatan memenuhi syarat (%)	2	92		
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (KTIPT)	2	4.009		
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKRTU)	2	851		
		Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan (rencana)	2	1		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Pop? Pemulihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah jumlah perempokan baru dan pemubangan tenaga kesehatan pada pemugasan khusus secara tim (Orang)	1	1.493		Kemendes
		Jumlah jumlah perempokan baru dan pemubangan tenaga kesehatan pada pemugasan khusus secara individu (Orang)	1	4.324		
		Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan (Orang)	1	660		
		Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	1	2.100		
Pop? Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Terlaksananya Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Jumlah insulasi farmasi (kebutuhan)/kota yang melakukan manajemen pengolahan obat dan vaksin sesuai standar (kebutuhan/ kota)	2	264		Kemendes, BROM
		Persentase produk alat kesehatan (dikenal dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat (%)	2	90		
		Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan (SDK) (aplikasi)	4	25		Kemendes
Pop? Peningkatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah SDM perigawa obat dan makanan yang terakreditasi sesuai standar (SDM Pengawasan)	2	83,6		BROM
Pop? Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen tertinggi dan 20 persen terendah (rasio)	1	0,74		
PP : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	a. SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,2		
		b. Pendidikan Tinggi	1	0,2		
		Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%) ^b	1	33		
		a. Membaca	1	30		
		b. Matematika	1	42,6		
		c. Sains	1	58,2		
		Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)	1	27,4		
		a. Literasi	1	27,4		
		b. Numerasi	1	27,4		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Peningkatannya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif	Tingkat penyelesaian pendidikan (%)	1	93,25		
		a. SD/MI/ sederajat		86,53		
		b. SMP/MTs/ sederajat		68,69		
		c. SMA/SMK/MA/ sederajat		68,06		
		Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	1	34,56		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	1			
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test ANSI (%)				
		a. Membaca	1	58,2		
		b. Matematika	1	27,4		
		c. Sains	1	31,4		
Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (%)	1	91,05				
Prop : Peningkatan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	Terlaksananya Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan (model kurikulum)	1	9		Kemendikbud, Kemeng
Prop : Peningkatan Kompetensi Pendidik	Memingkatnya kompetensi Pendidik	Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen (model pembelajaran)	1	72		Kemendikbud, Kemeng
Prop : Peningkatan Kualitas Pelatihan Pendidik	Menguatnya Kualitas Pelatihan Pendidik	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang tersedia untuk perbaikan pembelajaran (%)	1	50		Kemendikbud, Kemeng
Prop : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK (%)	2	2,79		Kemendikbud, LPP RRL, LPP TVR
Prop : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	Terwujudnya Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	Persentase perangkat/ model pembelajaran yang ber-kualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran (%)	1	100		Kemendikbud
KP : Pemertaaan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Terwujudnya Pemertaaan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (ratio)	1	105,5		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat (%)	1	104,48		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat (%)	1	94,34		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Setengah (%) Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarannya (Lerembag)	1	88,39		
Prop : Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Altmasi, dan Berbakat	Terlaksananya Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Altmasi, dan Berbakat	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran (%)	1	100		Kemendikbud, Kemeng, Kemenu, Kemendikbud
Prop : Pemangangan Anak Tidak Sekolah	Terlaksananya Pemangangan Anak Tidak Sekolah	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100% (Kab/Kota)	1	391		Kemendikbud
		Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPiLB sekurang-kurangnya 100% (Kab/Kota)	1	317		
		Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95% (Kab/Kota)	1	219		
Prop : Penguatan Pelayan 1 Tahun Prasekolah	Terlaksananya Penguatan Pelayan 1 Tahun Prasekolah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-6 tahun berkembang sesuai harapan (%)	1	64,7		Kemendikbud, Kemeng
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	1	13,53		
Prop : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Terlaksananya Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Persentase guru dan tenaga kependidikan bertertifikasi pendidik (%)	1	91,05		Kemendikbud, Kemeng
		Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 (%)	1	89,20		
Prop : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebumuhan	Terlaksananya Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebumuhan	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Setuan Pendidikan)	1	2.266		Kemendikbud, Kemeng
		Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Setuan Pendidikan)	1	6.797		
		Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Setuan Pendidikan)	1	6.117		
Prop : Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kuraja	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kuraja	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif (orang)	1	834.803		Kemendikbud, Kemeng

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Terwujudnya Mutu Pendidikan	Perentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (%)	1	81,19		
		a. SD/MI	1	76,01		
		b. SMP/MTs	1	74,53		
		c. SMA/MA	1	160		
Pop : Penguatan kapasitas dan Aksesrasi Akreditasi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Aksesrasi Akreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP (sekolah/madrasah)	1	57.490		Kemendikbud, Kemeng
Pop : Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	Terwujudnya Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan (Dokumen)	1	8		Kemendikbud, Kemeng
KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan	Perentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan (%)	1	100		
Pop : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan SPM Pendidikan	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan SPM Pendidikan	Jumlah provinsi memenuhi SPM Pendidikan (provinsi)	4	34		Kemendagri, Kemendikbud, Kemeng
Pop : Penguatan Strategi Penyediaan dan Efektivitas Efektivitas Pembiayaan Anggaran Pendidikan	Mengaturya Strategi Penyediaan dan Efektivitas Pembiayaan Anggaran Pendidikan	Jumlah PTN yang Mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Lambang)	4	243		Kemendikbud, Kemeng
Pop : Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	Meningkatnya Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	Perentase penyediaan dan pelayanan data pokok Pendidikan (%)	4	68,8		Kemendikbud, Kemeng
Pop : Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	Terwujudnya Sinkronasi Pelaksanaan PAUD-HI	Perentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif (%)	4	25		Kemendikbud
PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan pada berbagai aspek, pada media dan kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi dan berwirausaha	Perentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	1	9,80		
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	1	Menurun		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	1	73,5		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	1	53,13		
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	1	Menurun		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Terpeenuhnya Hak dan Perlindungan Anak	Presentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu orang tua (Pop) dan tidak tercap di dalam jenis jabatan white collar (%)	1	0,39		
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (nilai)	1	76,13		
Pop : Pemenuhan pemenuhan hak anak secara universal	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (nilai)	1	65,79		Kemendagri, Kemendiknas, Kemren PPPA
		Presentase bulat yang mendapatkan pengasuhan tidak layak (%)	1	3,59		
Pop : Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Tertaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KIA (Provinsi/Kabupaten/Kota)	1	270		
		Jumlah daerah dengan penurunan angka perkawinan anak (Provinsi)	1	5		
KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan	Presentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	1	100		MA, Kepolisian, Kemendiknas, Kemren PPPA
		Indeks PUG Nasional (nilai)	1	67,95		
Pop : Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Tertaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Presentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK (%)	1	38,1		Kemendagri, Kemren PPPA
		Presentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK (%)	1	61,76		
Pop : Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	Terwujudnya Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dan kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	Presentase perempuan korban kekerasan dan PPO yang mendapat layanan komprehensif (%)	1	40		Kemendagri, Kemren PPPA
		Presentase pemuda (16-30 tahun) yang mengabdikan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	1	81,97		
Pop : Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kemudahan	Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kemudahan	Presentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kemudahan (%)	1	25		Kemendagri
		Presentase tim koordinasi lintas sektor layanan kemudahan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk (%)	1	25		

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pemecahan Perilaku Beresiko Prop : Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	Perhitungannya pemuda dari perilaku berisiko Memikutinya partisipasi sosial dan politik pemuda terakhir (%)	Angka keaktifan pemuda (nilai)	1	7,43	Kemempora	
		Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	1	6,86		
PP : Penguatan Kemiskinan	Memperluas akses produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	1	38	Kemempora	
		Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	1	1.718.556		
KP : Absorpsi penguatan ekonomi keluarga miskin	Tersedianya penguatan ekonomi keluarga miskin	Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (%)	1	0,11	Kemempora	
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (KK)	1	3.328.071		
Prop : Fasilitasi Model Usaha KP : Keperawatan Usaha dan Dampak Sosial	Tersedianya pengembangan Keperawatan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperawatan usaha (desa)	1	11600	Kemempora, Kemensos	
		Pendamping kelompok usaha yang mendapat bantuannya (kelompok)	1	8.687.613		
Prop : Penguatan pemberdayaan berdampak sosial	Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	Pengembangan kewirausahaan sosial (KPM)	1	535	Kemensos	
		Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	150		
Prop : Peningkatan dan/atau Penguatan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan ketahanan	Tersedianya Peningkatan dan/atau Penguatan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan ketahanan	Jumlah KTH Mandiri (unit)	1	100	Kemendik Kemensos	
		Jumlah Lembaga Pelatihan Penguatan Usaha Keterampilan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) (pembentukan wawakarya wotokarya) (unit)	1	160		
KP : Reforma Agraria	Tersedianya Reforma Agraria	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, RPH, Gambut, dan Kemitraan Konsevasi) (orang)	1	2.000	Kemendik Kemendagri	
		Luas bidang tanah yang didistribusikan dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria (ha)	1	1.766.315		
Prop : Peningkatan dan/atau Penguatan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan ketahanan	Tersedianya peningkatan dan/atau Penguatan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan ketahanan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses RA (KK)	1	120.427	Kemendagri, Kemendik Kemendagri	
		Peningkatan pengurangan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) dalam kerangka reforma agraria (ha)	1	615		
Prop : Peningkatan Kualitas Data Perencanaan dan Legalisasi Atas Tora	Memperluas Kualitas Data Perencanaan dan Legalisasi Atas Tora	Jumlah bidang tanah yang didistribusikan dan dilegalisasi (Bidang)	1	409.936	Kemendagri, Kemendik Kemendagri	

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	Meningkatnya Kualitas Pendidik Vokasi	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri (Orang)	1	5.200		Kemendikbud, Kemarker
		Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upselling dan Reselling Berstandar Industri (Orang)	1	2.160		
		Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas managerial berbasis industri (Orang)	1	440		
		Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri (Orang)	1	400		
Prop : Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Menguatnya Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (orang)	1	300		Kemendagri, Kemarker, Kemendikbud
		Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD (Sekolah)	1	65		
Prop : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Menguatnya Sistem Sertifikasi Kompetensi	Penguatan Mata Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri (PT)	1	120		Kemendikbud, Kemempert, Kemn ESDM, Kemarker
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (orang)	1	1.890.345		
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Menguatnya Pendidikan Tinggi Berkualitas	Jumlah publikasi ilmiah di Jurnal Internasional (publikasi)	1	23.077		
		Jumlah sitasi di Jurnal Internasional (sitasi)	1	49.178		
		Jumlah Keayanan Inchebual yang didaftarkan dari hasil libang perguruan tinggi (KI)	1	182		
		Jumlah Paten yang dihibkan ke industri/dipakai di meserakat (paten)	1	10		
Prop : Penguatan Tinggi sebagai Produsen Ipdek Inovasi dan Pusat Keunggulan	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	Jumlah Paten yang dihibkan ke industri/dipakai di tahun (orang)	1	10		Kemendikbud, Kemempert
		Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun (orang)	1	220.000		
Prop : Peningkatan Kualitas Lulusan PT	Meningkatnya Kualitas Lulusan PT	Jumlah KI yang dimanfaatkan menjadi Lisensi (lisensi)	5	100		Kemarisistek/BRIN, LIP, BATAN, EPPF, LAPAN, Bapeten
		Jumlah hasil inovasi Flagship BRN (inovasi)	5	0		
Prop : Peningkatan Kapabilitas IPTEK dan Pencapaian Pencapaian Inovasi	Meningkatnya Pemanfaatan Ipdek dan penguatan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk perkembangan yang berkelanjutan	Jumlah SDM Ipdek yang ditandatangani kualifikasinya (orang)	1	970		Kemarisistek/BRIN, LIP, BATAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Pop : Peningkatan ekosistem inovasi	Terciptanya ekosistem inovasi	Jumlah STP yang ditingkatkan kuantitasnya (STP)	2	8		Kemertek/IBRI/ BATAN, LIFI
KP : Prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional	Jumlah olahraga andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021 (orang) Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade Tokyo 2021 (orang)	1 1	35 25		
Pop : Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	Jumlah match highlight yang ditayangkan dan dimonitoring dalam rangka penguatan siaran langsung dan era keolahragaan pendidikan dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah (kolaborasi)	1	2		Kemempora
Pop : Pengembangan budaya olahraga	Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (%)	1	35,4		Kemempora
Pop : Peningkatan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah	Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah	Persentase olahraga Olimpik di PPI/P/PTM yang menjadi olahraga andalan nasional (%) Persentase olahraga Olimpik/Paralimpik di SKO yang menjadi olahraga andalan nasional (%)	1 1	10 30		Kemempora, LPP TVRI
Pop : Peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap olahraga	Terlaksananya peningkatan ketertarikan masyarakat terhadap olahraga	Jumlah fasilitas penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah (event)	1	40		
Pop : Penataan kelembagaan olahraga	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Olahraga	Jumlah fasilitas pembinaan organisasi kelembagaan berbasis Olimpik dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan (kebanggo)	1	22		Kemempora
Pop : Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan bersandar internasional	Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan bersandar internasional	Jumlah pengabdian organisasi keolahragaan yang dilaksanakan dalam pelatihan manajemen dan pengembangan organisasi dan pengembangan olahraga (orang)	1	600		Kemempora
Pop : Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bersandar internasional	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana olahraga bersandar internasional	Jumlah tenaga keolahragaan olimpic yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan (orang)	1	2.340		
		Jumlah prasarana gedung olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi (unit)	2	11		Kemen PUPR/ Kemempora
		Jumlah prasarana pendukung PON XX dan Pegasus XVI Tahun 2021 di Papua yang dibangun, direnovasi dan/atau direhabilitasi (unit)	2	3		
		Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpic (kebanggo)	2	59		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP 7 Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keahliannya	Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keahliannya	Jumlah nasihat kebijakan pengembangan komitmen dan pengembangan olahraga yang disusun dan ditandatangani (dokumen) Jumlah koordinator dan komitmen keahliannya dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri (dokumen)	1	1		Kemempora
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendanaan proyek:						
Reformasi perlindungan Sosial						
Reformasi Kesehatan Nasional						
Pengakuan Anggaran Pendidikan						
Pengembangan event olahraga						

Keterangan:

Dibedakan terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Peningkatan Kualitas
- 4) Peningkatan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sama dengan pendataan THS, sebuah proyek dapat menduduki lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendataan distribusi lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rencana pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Triateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional merupakan Belanja K/L dan KPRU-AP. Penulisan angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGILATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DURKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
<p>PM : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>PP : Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berakhlak</p>	<p>Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu</p>	<p>Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)</p>	1	79,06	4.797.580,7	
		<p>Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)</p>	1	69,97		
		<p>Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)</p>	1	79,96		
		<p>Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)</p>	1	53,64		
		<p>Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)</p>	1	68,4		
<p>Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter</p>	<p>Meningkatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti</p>	<p>Indeks Karakter Remaja (nilai)</p>	1	68,42		
<p>KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti</p>	<p>Berdembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyramungkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)</p>	<p>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (berdasarkan hasil survei karakter pelajar)</p>	1	771,9		Kemendikbud
<p>Pop : Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyramungkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)</p>	<p>Mengaitnya peradaban agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan</p>	<p>Persentase guru pendidikan agama di sekolah kongoman dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya</p>	1	100,0		Kemendag
<p>Pop : Peningkatan kepedoporan dan ketahanan peradaban dalam pengembangan pendidikan kepahlawanan</p>	<p>Meningkatnya kepemimpinan, kepedoporan dan ketahanan peradaban dan berkembangnya pendidikan kepahlawanan</p>	<p>Jumlah pemda kader yang difasilitasi dalam pengembangan dan kepemimpinan (dan ketahanan) dan kepahlawanan (dalam)</p>	1	3500		Kemempora, Kemendikbud
<p>KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penggunakan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif</p>	<p>Mengaitnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif</p>	<p>Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani kebutuhan atau permintaan masyarakat (%)</p>	4	Meningkat (Baselin: 76,79 tahun 2019)		
		<p>Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jaha (%)</p>	4	Meningkat (Baselin: 80,32 tahun 2019)		
		<p>Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa telah dilakukan secara tanggap melayani kebutuhan atau permintaan masyarakat (%)</p>	4	Meningkat (Baselin: 79,63 tahun 2019)		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
<p>Prop : Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya</p> <p>Pop : Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi</p>	<p>Tertaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya</p> <p>Tertaksananya penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi</p>	<p>Jumlah Inansi yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FK) dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan publik (instansi)</p>	4	150		Kemen PANRB, LAN, BKPN
		<p>Jumlah laporan tindak lanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS (laporan)</p>	4	25		
<p>KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan pemerolehan karakter dalam pembentukan karakter</p>	<p>Mengantarnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan pemerolehan karakter masyarakat dalam pembentukan karakter</p>	<p>Indeks penguasaan keluarga yang memiliki remaja (indeks)</p>	1	76,22		
		<p>Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (indeks)</p>	1	33		
<p>Prop : Penyipaan kehidupan berkeluarga dan kecekapan hidup</p>	<p>Tertaksananya kehidupan berkeluarga dan kecekapan hidup</p>	<p>Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)</p>	1	31,46		BKKN, Kemnang
<p>Prop : Peningkatan ketahanan keluarga berkeadilan, keadilan, keharmonisan, kebersamaan, antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga</p>	<p>Tertaksananya Peningkatan ketahanan keluarga berkeadilan, keadilan, keharmonisan, kebersamaan, antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga</p>	<p>Persentase keluarga Baitia dan Anak yang Iku BKR (%)</p>	1	50		BKKN, Kemnang
<p>Prop : Penguatan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha</p>	<p>Tertumbuhnya lingkungan yang kondusif melalui peningkatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha</p>	<p>Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (bertingkat) Baik (%)</p>	1	8		Kemen PPPA
<p>KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental</p>	<p>Tertumbuhnya Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental</p>	<p>Jumlah pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental (pusat)</p>	1	20		
<p>Prop : Pematangan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Mandiri, Indonesia Berprestasi, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu</p>	<p>Tertumbuhnya Pematangan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Mandiri, Indonesia Berprestasi, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu</p>	<p>Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (kegiatan)</p>	1	49		Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikbud, Kemendikbud
<p>Prop : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah</p>	<p>Tertaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah</p>	<p>Jumlah pusat-pusat perubahan di tingkat daerah yang dikukuhkan pemerintah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan program UNRM (pusat perubahan)</p>	1	20		Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, Kemendikbud, Kemendikbud
<p>KP : Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kenyamanan berlandaskan Pancasila</p>	<p>Tumbuhnya Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kenyamanan berlandaskan Pancasila</p>	<p>Persentase rumah tangga yang menyatakan tempo peningkatan jumlah usaha baru di wilayah tempat tinggal rumah tangga dalam 6 bulan terakhir</p>	5	Meningkat (Baseline 77,94 tahun 2019)		
<p>Prop : Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif</p>	<p>Tumbuhnya budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif</p>	<p>Jumlah koperasi yang dinilai kesesuaiannya</p>	5	50		Kemen KUKM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berdasarkan berlandaskan semangat gotong royong	Meningkatnya etos kerja dan kewirausahaan berdasarkan semangat gotong royong	Jumlah masyarakat yang terjaring untuk memulai berwirausaha (orang)	5	7000		Kemendikbud
Prop : Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	Terwujudnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri	Jumlah peserta kampanye penggunaan produk DN (orang)	5	1000		Kemendag
KP : Pembiayaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembiayaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (%)	1	100		
Prop : Pembiayaan Ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	Meningkatnya pembiayaan, ideologi Pancasila, pendidikan kewargan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan ideologi Pancasila, pendidikan kewargan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara (%)	1	100		Kemendagri, Kemendikbud, Wartanaras, Lembhanas, BPIP
Prop : Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembiayaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembiayaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan peningkatan peran dan fungsi BPIP (%)	1	100		BPIP
Prop : Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.	Terwujudnya Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila (dokumen)	3	3		BPIP
Prop : Memperbaiki unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	Terwujudnya Pembaruan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan pemangangan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara (dokumen)	1	3		BPIP
PP : Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Keajaiban Rakyat, Dan Mempengaruhi Arus Perombangan Peradaban Dunia	Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	1	49,36		
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	1	37,79		
		Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	1	40,28		
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terdaftar total registrasi	1	3,55		
Prop : Peningkatan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Terwujudnya Peningkatan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan objeK pemajuan kebudayaan (satuan pendidikan)	1	0		Kemendikbud
Prop : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembiayaan museum dan taman budaya (persentase)	1	50		Kemendikbud, ANRI

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pelestarian, pengembangan dan pemertanian manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	Terwujudnya Pelestarian, pengembangan dan pemertanian manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno (%)	1	20		Perpunas, ANRI
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan kerajinan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 10 tahun ke atas) (%)	1	0,39		
Prop : Pengembangan produk seni, budaya, dan Film	Terwujudnya Pengembangan produk seni, budaya, dan Film	Jumlah karya Perfilmn dan Musik Indonesia (judul)	1	35		Kemendikbud
Prop : Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Terwujudnya Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan (festival)	1	9		Kemendikbud
Prop : Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (%)	1	30		Kemendikbud
Prop : Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka pengamatan dan perlindungannya (kumudati) (komunitas)	1	5		Kemari KP
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Terwujudnya pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat (%)	1	22,33		
Prop : Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan peningkatan hidup	Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan peningkatan hidup	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan (wilayah adat)	1	5		Kemendikbud, Kemari ATN/DPN
Prop : Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Jumlah Perguruan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat (lembaga)	1	30		Kemendikbud
Prop : Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	Persentase database KI Komunal yang terintegrasi pada Aplikasi (%)	1	75		Kemerkumham
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang)	1	500		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, mubtahir seni budaya, dan kultur nusantara Pop : penggiatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri	Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, mubtahir seni budaya, dan kultur nusantara Meningkatnya Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Disapresiasi (konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang) Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Disapresiasi (konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang)	1 1	500 500		Kemerklibud Kemerklibud
KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan Prop : Penggalian dana perwalian kebudayaan Prop : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan Tertaksananya penggalian dana perwalian kebudayaan Tertumbuhnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	Jumlah layanan pengelolaan dana perwalian kebudayaan (layanan) Jumlah SDM kebudayaan yang ditandingkan kompetensiya (orang)	1 1	1 6056		Kemerklibud Kemerklibud
Prop : Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Prop : Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu Prop : Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	Tertaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan Tertaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu Tertaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan (kegiatan) Jumlah layanan umum, kerja sama dan kemitraan bidang kebudayaan (layanan)	1 1	80 1		Kemerklibud Kemerklibud
PP : Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengubah Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengubah Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kepuasan Layanan ibadah Haji (nilai) Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal (nilai) Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Kengaman Budaya (nilai)	1 1 1	85,96 81 65 70		Kemerklibud
KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan peradaban dan kebersamaan di kalangan umat beragama Prop : Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kesejahteraan umat Prop : Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekruitmen guru	Mengukanya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan peradaban dan kebersamaan di kalangan umat beragama Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kesejahteraan umat Menguatnya Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekruitmen guru	Tingkat modernisasi beragama kelompok sasaran penyubhan agama (%) Rasio penyubh agama dengan kelompok sasaran yang didapatkan umhribing agama Percentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik (%)	1 1 1	86,42 0,05 73,75		Kemengag, LPP TVRI Kemengag

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasyarakatan	Meningkatnya Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui penguatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemasyarakatan	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliah, pendidikan Al-Qur'an dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama (%)	1	3,5		Kemendag
Prop : Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Terwujudnya Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah (%)	1	100		Kemendag
Prop : Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa	Terlaksananya Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama (orang)	1	1000		Kemendag, Kemendikbud
KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (%)	1	100		
Prop : Pelaksanaan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	Terwujudnya Pelaksanaan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (%)	1	100		Kemendag
Prop : Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perikat persatuan dan kesatuan bangsa	Terwujudnya Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perikat persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (%)	1	15		Kemendag
Prop : Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Terwujudnya Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama (%)	1	100		Kemendag, Kemendagri
KP : Penyelenggaraan Relasi Agama dan Budaya	Terwujudnya Penyelenggaraan Relasi Agama dan Budaya	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (%)	1	75		
Prop : Penguatan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Terwujudnya Penguatan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Budaya keagamaan yang dilina dan dikembangkan	1	35		Kemendag
Prop : Pengembangan Heresi Khazanah budaya bernilai agama	Terwujudnya Pengembangan Heresi Khazanah budaya bernilai agama	Persentase Heres khazanah budaya bernilai agama yang dihasilkan dan mudah diakses (%)	1	27,3		Kemendag
Prop : Pelaksanaan situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Terwujudnya Pelaksanaan situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Persentase event keagamaan dan budaya yang menumbuhkan kebanggaan sikap toleran (dari besar keagamaan) yang difasilitasi (%)	1	100		Kemendag
KP : Penguatan Kualitas Pelayanan Keadayaan Beragama	Terwujudnya Penguatan Kualitas Pelayanan Keadayaan Beragama	Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (%)	1	50		
Prop : Penguatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Terwujudnya Penguatan Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan keagamaan (%)	1	80		Kemendag
Prop : Penguatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	Persentase keluarga yang menerima layanan dan bimbingan perkawinan (%)		50		Kemendag

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Persentase produk yang terregistrasi dan terverifikasi halal berdasarkan permohonan (%)	1	60		Kemdag
Prop : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Persentase jamaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (%)	1	85,25		Kemdag, Kemhks
KP : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (%)	1	51		
Prop : Pemberdayaan dana sosial keagamaan	Terwujudnya Pemberdayaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (%)	1	27,37		Kemdag
Prop : Pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Umat	Terwujudnya Pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Umat	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah (%)	1	12		Kemdag
Prop : Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (%)	1	92		Kemdag
PP : Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengertian, Dan Berbudaya	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengertian, inovatif dan kreatif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	1	12		
KP : Peningkatan Budaya Literasi	Terwujudnya Peningkatan Budaya Literasi	Rasio ketersediaan koleksi perpustakaan dengan penduduk (keju)	1	1:15		
		Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk (keju)	1	1:19.000		
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar (%)	1	20,45		
Prop : Pengembangan budaya kegemaran membaca	Terwujudnya Pengembangan budaya kegemaran membaca	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi (orang)	1	32249		Kemendagri, Kemendikbud, Perpusnas
Prop : Pengembangan sistem perpustakaan dan penguatan konten literasi	Terwujudnya Pengembangan sistem perpustakaan dan penguatan konten literasi	Jumlah SDM Perbukitan yang terverifikasi (orang)	1	300		Kemendikbud, Perpusnas
		Jumlah Lembaga Perbukitan yang terakreditasi (lembaga)	1	20		
Prop : Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	1	884		Perpusnas, Kemensos
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Terwujudnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia (nilai)	1	515		
Prop : Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Terwujudnya Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia (negara)	1	30		Kemendikbud

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas sebagai khazanah budaya bangsa	Terwujudnya Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas dan terancam punah	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia (kosakata) Jumlah Teranga Profesional yang Mahir Berbahasa Indonesia (orang)	1	130030 73050		Kemendikbud
KP : Pengembangan budaya Iprek, Inovasi, Kreativitas, dan daya upaya	Terwujudnya pengembangan budaya Iprek, Inovasi, Kreativitas, dan daya upaya	Jumlah pedik riset dan Inovasi yang dihasilkan Sistem pendidik yang mampu mendampingi peneliti (pendidi)	1	20		
Prop : Peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini	Terwujudnya peningkatan budaya riset dan ekperimentasi ilmiah sejak usia dini	Jumlah partisipan dalam kompetisi Karya Ilmiah Remaja (KIR) dan Nasional Young Inventor Award (NYIA) (Proposal)	1	4000		LPI
Prop : Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	Terwujudnya budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	UMKM yang menerapkan Iprek dalam proses produksinya (UMKM)	1	10		LPI
KP : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Persentase Intitusi perpusakaan yang terghubung dalam jejaring nasional perpusakaan (perpusakaan)	1	0,35		
Prop : Pengembangan mitra perpusakaan (library supporter)	Terwujudnya Pengembangan mitra perpusakaan (library supporter)	Jumlah perpusakaan yang terghubung dalam jejaring nasional perpusakaan (perpusakaan)	1	500		Perpunas
Prop : Pengembangan inovasi sosial yang dilibatkan dan pendanaan filantropi	Terwujudnya Pengembangan inovasi sosial yang dilibatkan dan pendanaan filantropi	Jumlah Pojek Beca Digital di Daerah (lokasi)	1	160		Perpunas

Keterangan:

- Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:
- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Pevredchanaan Regulasi
- 4) Pevredchanaan Birokrasi
- 5) Transfarmasi Ekoonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendidekian THIS, sebuah proyek dapat mendibne lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (Pop) dan Proyek K/L masih dalam proses pendidekian dan pendidekian distribsi alokasi serta lobasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Triadernal Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional merokkup Belanja K/L dan KPPU-AP, Permutakhiran angka, idenfikasi dan integrasi antartansansi, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUMN, Swasal) akan dilakikan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DURKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PM : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Rasio KFR terhadap PDB (%)	2	3,10	118.712.378,9	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	2	92,67		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	2	81,99		
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	2	47,62		
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	92,81		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	8,4		
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum terjangkau perpipaan (%)	2	23,54		
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,27		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	2	79,43 layak, termasuk 10 aman		
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	2	4,46		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan (%)	2	73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan		
	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air baku secara berkelanjutan (kabupaten/kota)	2	173		
	Meningkatkan Layanan Keselamatan dan Keamanan transportasi	Rata-rata waktu tanggap pencaratan dan pertolongan (menit)	2	27		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Meningkatnya Optimalitas Waduk Multi-tujuan dan Modernisasi Irigasi	Volume tampungan air per kapla (Kumulatif, m ³ /kapla) Persentase luas sawah bertirigasi (%) Luas daerah tirigasi premium yang dimodernisasi (ha)	2 2 2	53.53 54 398.123		
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau	Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun (unit) Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga) Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan (rumah tangga) Jumlah peningkatan kualitas hunian (unit) Jumlah penguasaan luas kawasan permukiman kumuh (ha)	2 2 2 2 2	223.180 85.000 197.496 152.510 5.779		
Pop : Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Tersedianya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui bantuan pemerintah (unit) Jumlah perizinan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (perzini)	2 2	18.417 10.000		Kemendagri, Kemen PUPR
Pop : Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tersedianya Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP) (rumah tangga) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas hunian (rumah tangga)	2 2 2	197.496 85.000 150.300		Kemendagri, Kemen PUPR
Pop : Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	Tersedianya Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah rumah yang dibayai bantuan PSU mode perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar (unit)	2	40.000		Kemendagri, Kemen PUPR
Pop : Fasilitas Peningkatan Standar Ketersediaan Bangunan dan Keamanan Perumahan (MIB dan SIB)	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Standar Ketersediaan Bangunan dan Keamanan Perumahan (MIB dan SIB)	Jumlah kabupaten/kota yang merestorasi huni Ketersediaan Bangunan (KB) dan Sertifikat Hank Bangun (SHB) (kabupaten/kota)	2	49		Kemendagri, Kemen PUPR
Pop : Fasilitas Peningkatan Permukiman Kumuh	Tersedianya Fasilitas Peningkatan Permukiman Kumuh	Jumlah hunian permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (ha)	2	5.779		Kemendagri, Kemen PUPR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengadaan Air Laminar Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perubuhan (kab/kota) Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota) Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota) Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota) Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota) Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menyaji asses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%) Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%) Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM, UPTD, KPSPAMS dll) (%) Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strateg Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	168 50 56 108 13 25 63 40 33 33 33		Kemen PUPR, Kemendagri, Kemendes
Prop : Peraturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Terlaksananya Peraturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah provinsi yang terfasilitasi peraturan sanitasi daerah (dalam pengesahan sampai dan air limbah domestik (provinsi)) Perencana desa/keurahan dengan Stop Bangun Air Besar Sembaraman (SBS) (%) Jumlah provinsi yang terfasilitasi peraturan sanitasi daerah (dalam pengesahan sampai dan air limbah domestik (provinsi)) Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strateg Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	34 55 34 40 5 101 514 12 34		Kemen PUPR, Kemendagri
Prop : Penguasaan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Terlaksananya Penguasaan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Jumlah kab/kota yang memiliki KISPAK (Kab/Kota) SPAM yang memiliki dokumen Rencana Penguasaan Air Minum (RPAM) (kab/kota) Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12 34		Kemen PUPR, Kemendes, Kemen LHK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Terkejalannya Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah kab/kota yang memiliki effluent PPL, PPLT, dan kecacah TPA yang memenuhi syarat (kab/kecil)	2	33		
		Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan (m ³ /detik)	2	88,32		
		Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi) (%)	2	51,1		
Pop : Penyediaan dan penggunaan air baku dan air tanah	Terlaksananya Penyediaan dan penggunaan air baku dan air tanah	Tambahan debit air baku (m ³ /detik)	2	4,45		Kemen PUPR
Pop : Peningkatan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	Terlaksananya Peningkatan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP) (dukumen)	2	4		Kemendagri, Kemen PUPR, Kemen ESDM
Pop : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Terlaksananya Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Jumlah wilayah sursug kewenangan pusat yang memiliki dan/atau mempertahankan kebijakan PSDA terpadu (wilayah sursug)	2	11		
KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Terlaksananya Pemeliharaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	Persentase kesiapan pengembangan SISDA terpadu berbasis smart water management.	2	20		Kemen PUPR
		Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (lalu)	2	1,25		
		Rasio kejadian kecelakaan penyeberangan per 1 juta penyeberangan (lalu)	2	65		
		Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (lalu)	2	0,25		
		Jumlah peralihan SAR yang disediakan (paket Nasional) (Provinsi)	2	77		
Pop : Pemeliharaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	Terlaksananya Pemeliharaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	2	33		
		Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun (provinsi)	2	33		
		Jumlah Prtgad dan Pemasangan ATCS dan ITS (lokasi)	2	7		
		Jumlah SDA percairan dan pertolongan yang berkompeten (orang)	1	5.000		
		Jumlah luhban Dilket Pembencanaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi (orang)	1	45.641		
Pop : Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, percairan dan pertolongan	Terlaksananya Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, percairan dan pertolongan					Kemendub, Basarnas

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Terwujudnya Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir (baseline 2019:12.6%) (%) Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut (baseline: -96.7%) (%) Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api (baseline 2019:-88.8%) (%)	2	0		
Pop: Pengembangan keahlian wilayah untuk ketahanan bencana dan pengisian infrastruktur vital tahan bencana	Terlaksananya Pengembangan keahlian wilayah untuk ketahanan bencana dan pengisian infrastruktur vital tahan bencana	Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk mitigasi ketahanan wilayah hidrometeorologi dan hidrogeologi (wilayah sungai) Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk mitigasi ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami (provinsi)	2	5		Kemendagri, Kemen PUPR
Pop: Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan pengisian infrastruktur perikanan tangkap (wilayah sungai) Jumlah provinsi dengan pembangunan dan pengisian infrastruktur perikanan tangkap (provinsi) Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan pengisian infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir (kawasan pesisir)	2	20		Kemen PUPR
Pop: Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Terlaksananya Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah (kab./kota) Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah (CAT) Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir (Wilayah sungai) Jumlah baksi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor (baksi) Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana (kegiatan)	2	6		Kemen ESDM, Kemen PUPR
Pop: Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Terlaksananya Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air (kawasan)	2	1		Kemen PUPR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Tebangannya Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif) Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (Kumulatif) Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit) Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi (Daerah Irigasi) Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan non padi (ha)	2	15,1 15 20 2	86.000	Kemen PUPR
Prop : Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	Terlaksananya Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)	2	6		Kemen PUPR
Prop : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun (unit)	2	13		Kemen PUPR
Prop : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Terlaksananya Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit)	2	15		Kemen PUPR
		Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan diperbaiki (unit)	2	5		
		Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)	2	36,53		
Prop : Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Terlaksananya Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (unit)	2	20		Kemen PUPR
Prop : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (ha) Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (ha)	2	85.000 250.000		Kemen PUPR
Prop : Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Terlaksananya Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Jumlah dokumen peningkatan pengendalian alokasi air (dokumen)	2	40		Kemen PUPR
Prop : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Terbangunnya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Jumlah kelembagaan irigasi yang ditingkatkan kapasitas keberfungsian (unit)	2	3		Kemen PUPR
Prop : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Terbangunnya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (ha)	2	1000		Kemen PUPR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan nasional (%)	2	93		
		Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)	2	69,5		
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	2	58,5		
		Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)	2	242		
		Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	2	83		
		Panjang jalan baru yang terbangun (kumulatif) (km, yg)	2	6.293		
		Jumlah pelebahan utama yang memenuhi standar (lokasi)	2	2		
		Jumlah rate subbidai tol laut (rate)	2	26		
		Jumlah pelebahan penyebangan baru yang dibangun (lokasi)	2	6		
		Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	2	12 (berlanjut)		
		Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Dukung APBN; lokasi)	2	40 (berlanjut)		
		Panjang jalan pada kawasan prioritas yang dibangun (km)	2	679		
		KP : Konektivitas Jalan	Terwujudnya konektivitas jalan	Panjang Jalan Lintas Utama Pulau ditangani (km)	2	1.165
Panjang Kermbantan Lintas Utama Pulau ditangani (m)	2			3.341		Kemren PUPR
Panjang jalan tol yang dibangun (dukungan APBN; km)	2			3		Kemren PUPR
Panjang jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KL, KEK, dan KSPN) yang ditangani (km)	2			90,6		Kemren PUPR
Panjang jalan Akses Simpul Transporasi (Palabuhan, Bandara, Terminal) yang ditangani (km)	2			38,5		Kemren PUPR
Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk pemeliharaan/pebaruan) (km)	2			4.927,00		Kemren PUPR
Panjang jalan daerah yang dibangun (km)	2			50,0		Kemren PUPR
Panjang pemban daerah yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (m)	2			5.992		Kemren PUPR
Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis	2					Kemren PUPR
Terlaksananya Pembangunan Jalan Tol	2					Kemren PUPR
Terlaksananya Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KL, KEK, dan KSPN)	2					Kemren PUPR
Terlaksananya Pembangunan Jalan Akses Simpul Transporasi (Palabuhan, Bandara, Terminal)	2					Kemren PUPR
Terlaksananya Preservasi jalan nasional (termasuk pemeliharaan/pebaruan)	2					Kemren PUPR
Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	2			Kemren PUPR		

PROGRAM PRIORITAS (PM)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan Wilayah Suramadu	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Suramadu	luas lahan Wilayah Suramadu yang dikembangkan (ha)	2	35		BPWS
Prop : Pengembangan Wilayah Suramadu yang dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (km)		Panjang jalan Wilayah Suramadu yang dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (km)	2	13,7		
Prop : Prasarana/Sarana Perumahan Wilayah Suramadu dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (paket)		Jumlah Prasarana/Sarana Perumahan Wilayah Suramadu dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (paket)	2	1		
Prop : Kawasan yang di pilihkan (kawasan)		Jumlah Kawasan yang di pilihkan (kawasan)	2	1		
KP : Konktivitas Kereta Api	Terwujudnya Konktivitas Kereta Api	Jumlah Jalur Kereta Api yang dibangun (lokasi)	2	7		Kemhub
Prop : Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	Terlaksananya Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	Jumlah Jalur Kereta Api yang dibangun (lokasi)	2	4		Kemhub
Prop : Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Terlaksananya Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)	2	15		Kemhub
Prop : Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	Terlaksananya Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	Jumlah KA akses Pelabuhan dan Bandara yang dibangun (lokasi)	2	3		Kemhub
Prop : Penyediaan PSO dan Subsidi	Terlaksananya Penyediaan PSO dan Subsidi	Jumlah layanan subsidi perkotaan yang tersedia (lantas)	2	9		Kemhub
KP : Konktivitas Laut	Terwujudnya konktivitas laut	Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konktivitas laut (lokasi)	2	15		
		Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur (rate)	2	26		
		Jumlah layanan angkutan laut perintis (rate)	2	113		
		Jumlah layanan angkutan ternak (rate)	2	6		
		Jumlah sarana transportasi laut yang dibangun (unit)	2	24		
		Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan (lokasi)	2	12		Kemhub
Prop : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Jumlah pelabuhan pendukung kawasan pariwisata prioritas (lokasi)	2	3		Kemhub
Prop : Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur (rate)	2	145		Kemhub
Prop : Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut	Jumlah kapal negara yang dibangun (unit)	2	24		Kemhub

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengembangan teknologi informasi pelayanan KP : Konktivitas Udara	Terlaksananya Pengembangan teknologi informasi pelayanan Terwujudnya konktivitas udara	Jumlah teknologi informasi pelayanan yang dikembangkan (unit)	2	22		Kemhub
		Penyediaan layanan jembatan udara (paket) yang dikembangkan (lokasi)	2	1		
Prop : Jembatan udara	Terlaksananya Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM Pendukung Jembatan Udara	Jumlah bandara pendukung konktivitas udara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		Kemhub
		Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (lokasi)	2	21		
Prop : Pembangunan bandara baru	Terlaksananya Pembangunan bandara baru	Penyediaan bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (lokasi)	2	1		Kemhub
		Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	2	40		
Prop : Pengembangan Bandara Hub Primer	Terlaksananya Pembangunan Bandara Hub Primer	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		Kemhub
		Jumlah bandara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		
Prop : Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	Terlaksananya Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	Jumlah kajian penyusunan bandara perairan (dokumen)	2	21		Kemhub
		Jumlah penelitian pengembangan, danaan dan snggal yang dibangun dan dikembangkan (lokasi)	2	41		
KP : Konktivitas Darat	Terwujudnya Konktivitas Darat	Jumlah terminal penumpang dan barang antar-rang (lokasi)	2	7		Kemhub
		Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan (lintas)	2	234		
Prop : Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Terlaksananya Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Jumlah layanan perintis angkutan jalan (lintas)	2	307		Kemhub
		Jumlah Pelabuhan penyeberangan, danaan dan snggal pada jalur logistik yang dibangun (lokasi)	2	30		
Prop : Pembangunan terminal penumpang dan barang antar-rang	Terlaksananya Pembangunan terminal penumpang dan barang antar-rang	Jumlah terminal antar-rang yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	2	7		Kemhub
		Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	2	6		
Prop : Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	Terlaksananya Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	2	234		Kemhub
		Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)	2	307		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kota)	2	5		
KP : Transportasi Perkotaan	Terselenggaranya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota yang dikembangkan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (perkotaan)	2	2		
Prop : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Tertaksananya Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Jumlah kota yang dibangun angkutan massal berbasis rel (perkotaan)	2	2		Kemendhub
Prop : Pengembangan Fasilitas Alih Moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	Tertaksananya Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	Jumlah fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun (lokasi)	2	7		Kemendhub
Prop : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	Tertaksananya Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	Jumlah Perkotaan yang dikembangkan Sistem Angkutan Umum Massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)	2	1		Kemendhub
Prop : Pembangunan jalan perkotaan	Tertaksananya Pembangunan jalan perkotaan	Panjang jalan perkotaan yang dibangun (km)	2	39		Kemen PUPR
		Panjang Fly-Over dan Underpass di perkotaan yang dibangun (meter)	2	10		
		Panjang Fly-Over dan Underpass di perkotaan yang dibangun (meter)	2	1.241		
Prop : Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Tertaksananya Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Jumlah subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	2	10		Kemendhub
Prop : Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Tertaksananya Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Panjang perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun (lokasi)	2	2		
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Terselenggaranya Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap setidaknya terhadap total rumah tangga (%) (kumulatif)	2	16,25		
Prop : Pengembangan TIK Perkotaan	Tertaksananya Pengembangan TIK Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap (Rumah tangga)(kumulatif)	2	11.000.000		Kemendkominfo
Prop : Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Tertaksananya Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Jumlah kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan KKN yang telah melaksanakan manajemen smart city (kota/kota kumulatif)	2	51		
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Tertaksananya Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (kota/kota)	2	7		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
<p>Prop : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi</p> <p>KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</p>	<p>Tertaksananya Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi</p> <p>Tertaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Perumahan Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan</p>	<p>Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (BUMD Air Minum/ PDAM)</p> <p>Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/ PDAM)</p> <p>Jumlah pengurangan kawasan kumuh di perkotaan (kawasan)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>7</p> <p>3</p> <p>0</p>		<p>Kemren PUPR</p>
<p>Prop : Fasilitas Pemangangan Permukiman Kumuh Perkotaan</p> <p>PP : Energi Dan Ketengalistrikan</p>	<p>Tertaksananya Fasilitas Pemangangan Permukiman Kumuh Perkotaan</p> <p>Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien</p>	<p>Jumlah perencanaan permukiman kumuh di perkotaan (kawasan)</p> <p>Nilai Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)</p> <p>Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota-kumulatif (SR)</p> <p>Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (barrel per Calendar Day/PPCD)</p> <p>Jumlah Produser Tenaga Listrik (GWh)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0</p> <p>4,92</p> <p>1.470.506</p> <p>1.151.000</p> <p>359.946</p>		<p>Kemren PUPR</p>
<p>KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketengalistrikan</p>	<p>Tertaksananya Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketengalistrikan</p>	<p>Nilai Penurunan Intensitas Energi Final (SEMI/Militer Rupiah)</p> <p>Prosentase Porti kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)</p> <p>Kapasitas Terpasang EBT Tambahan (MW)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>0,9</p> <p>15</p> <p>743,41</p>		<p>Kemren ESDM</p>
<p>Prop : Perubahan efisiensi dan emisi energi dan ketengalistrikan</p> <p>KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketengalistrikan</p>	<p>Tertaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketengalistrikan</p> <p>Meningkatnya Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketengalistrikan</p>	<p>Perentase Sifat Jaringan (%)</p> <p>System Average Interruption Duration Index (SAIDI) menjadi (jam/pelanggan)</p> <p>Jumlah penyediaan gas (SEMI)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>9,01</p> <p>10</p> <p>185.530</p>		<p>Kemren ESDM</p>
<p>Prop : Perluasan Jaringan Gas Kota</p> <p>Prop : Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketengalistrikan</p> <p>KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik</p>	<p>Tertaksananya Perluasan Jaringan Gas Kota</p> <p>Tertaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketengalistrikan</p> <p>Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup</p>	<p>Jumlah Pembangunan Jaringan Gas Kota-ABRN(Sambungan Rumah)</p> <p>Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)</p> <p>Jumlah Perambahan Penyulur BBM Satu Harga (penyalur)</p> <p>Jumlah cadangan operasional BBM (haar)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>2</p>	<p>120.776</p> <p>79.187</p> <p>76</p> <p>23</p>		<p>Kemren ESDM</p>
<p>Prop : Peningkatan kemandirian infrastruktur energi dan ketengalistrikan</p>	<p>Tertaksananya peningkatan kemandirian infrastruktur energi dan ketengalistrikan</p> <p>Tertaksananya Pembangunan Pipa Gas Bumi</p>	<p>Panjang Rona Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang di selesaikan kumulatif (km)</p> <p>Jumlah Perambahan Kapasitas Pembangkit (MW)</p> <p>Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketengalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>15.800</p> <p>6.446</p> <p>3</p>		<p>Kemren ESDM</p>

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pembangunan Kilang Minyak Bumi Kalimantan	Terlaksananya Pembangunan Kilang Minyak Bumi Kalimantan	Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu BOP)	2	1151		Kemen ESDM
		Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan (km)	2	0		Kemen ESDM
PP : Transformasi Digital	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Perentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	2	8,8		
		Proporsi Individu yang mengguna/ memiliki telepon genggam (%)	1	74,2 72		
KP : Penuaan Infrastruktur TIK	Terlaksananya penataan Infrastruktur TIK	Perentase wilayah kepemilikan yang mendapatkan akses seluler (4G) (persen kumulatif)	2	98,5		
		Perentase keamanan yang terdangan infrastruktur jaringan serat optik (persen kumulatif)	2	37,15		
		Perentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps) (%)	2	10		
		Perentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kota 1 GB) (%)	2	0,4		
		Perentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik (%)	2	91		
		Perentase jangkauan populasi penyiaran TV digital (%)	2	60		
		Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G (kumulatif) (desa)	2	4.200		Kemerkominfo
		Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital (lunir)	2	10		Kemerkominfo, LPP RRI, LPP TVRI
		Perentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network) (%)	2	15		Kemerkominfo
		Perentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB (%)	5	4,5-5,7		
Prop : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Jumlah aplikasi generic yang dikembangkan secara multi platform (pbbks)	4	15		Kemerkominfo
Prop : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Jumlah aplikasi generic yang dikembangkan secara multi platform (pbbks)	4	15		Kemerkominfo

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Pop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Pop : Pemertaaan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemertaaan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	5	0		Kemendikominfo
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Tersedianya Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (permasuk kawasan prioritas) untuk menuai ekonomi digital (peserta)	1	50.000		
Pop : Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	Terlaksananya Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa dijangkau per tahun (kumulatif (konten))	1	150.000		Kemendikominfo
Pop : Pengembangan literasi dan keahlian TIK	Terlaksananya Pengembangan literasi dan keahlian TIK	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (orang)	5	12.448.750		Kemendikominfo
Pop : Pengembangan dan fasilitas industri TIK	Terlaksananya Pengembangan dan fasilitas industri TIK	Persentase pencapaian P3MP Biaya Halak Penggunaan (GHI) Prekursor Rasio (%)	5	100		Kemendikominfo
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendanaan proyek:						
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas						
Pengembangan Teknologi Informasi Komunitas (TIKI)						
Pemeliharaan dan Perawatan Infrastruktur						
Pengendalian banjir dan daerah lainnya serta						
penugasan lainnya						
Infrastruktur energi						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Pemberdayaan Regulasi
- 4) Pemberdayaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekosistem

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional.
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (Pop) dan Proyek KI masih dalam proses pendalaman dan pendanaan diatribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Virtual Meeting*.
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional merujuk Belanja K/L dan KPPU-AP. Penunjukkan angka, identifikasi dan integrasi antartansansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUNN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DURKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PM : Membangun Lingkungan Hidup, Mengingatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim PP : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut Menurunkan potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai) Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTG) (nilai)	5 5 5 5	55,20 59,00 84,20 62,50	10.468.202,9	
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi) usaha dan/atau kegiatan yang terpantau dan/atau pemantauan hidup (perusahaan)	5	70		
		Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	5	2,0		
		Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari baseline (%)	5	27,0		
		Luas kawasan konservasi (juta ha)	5	24,6		
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	5	77		
		Akurasi Informasi Klimatologi (%)	5	76		
		Jumlah pengambilan air pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis (unit)	5 dan 2	25		
		Jumlah pengambilan air pemantauan kualitas air sungai dan/atau perairan lainnya	5 dan 2	150		
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual (lokasi)	5 dan 2	34		
		Jumlah badan usaha yang terpantau memonitori baku mutu emisi (badan usaha)	5 dan 3	2.625		
		Jumlah badan usaha yang terpantau memonitori baku mutu air limbah (badan usaha)	5 dan 3	2.625		
		Jumlah pelepasan yang terpantau melaksanaan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelepasan)	5 dan 3	25		
Jumlah badan usaha yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (badan usaha)	5 dan 3	85				
Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (badan usaha)	5 dan 3	350				
Jumlah lokasi pengawasan terpadu efisiensi IPL, IPLT, dan Lactate IPA (lokasi/area)	5 dan 3	33				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	Tersedianya Informasi Cuaca dan Iklim	Persentase Informasi Meteorologi yang Berkualitas (%) Persentase Informasi Klimatologi yang berkualitas (%)	5 dan 3	87 79	BMKG	
Prop : Percegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Memurninya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	Jumlah desa yang terdapat dari kebakaran hutan dan lahan (Desa) Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kebakaran/ rencana air yang semakim kembali dalam suatu KHD (KHD) dan Berbudaya Lingsungun Hidup (LHD) Jumlah produk ramah lingkungan yang terregistrasi dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (produksi)	5 dan 2 5 dan 2 1 dan 5 1 dan 5	1.200 100 730 5	Kemren LHK	Kemren LHK
Prop : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Luas kawasan konservasi (Juta ha) Luas kawasan konservasi perairan pesisir dan laut (Juta ha) Luas kawasan konservasi perikanan (Juta ha) Jumlah unit pendidikan kebani di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka percegahan kebhawanan kebani dan kesehatan ekosistem (unit) Luas hutan dengan indeks Jasa Lingkungan tinggi (Juta ha)	5 5 5 5 5	27 12.500.000 22 65	Kemren LHK, Kemren KP, LHD	Kemren LHK, Kemren ESDM, Kemrenku, Kemrentan
Prop : Penyediaan Data dan Informasi Kelembagaan Hayati dan Ekosistem	Tersedianya Data dan Informasi Kelembagaan Hayati dan Ekosistem	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kelembagaan hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (ha) Jumlah sampah yang terkoleksi secara nasional (Juta ton) Persentase penurunan sampah yang terbung ke laut dari bawahan (%) Jumlah limbah BS yang terkoleksi (Juta ton) Jumlah limbah B3 yang terkoleksi yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (%)	5 5 5 5 5	18.000.000 67,1 30 98,68 0,0923	Kemren LHK, Kemren KP	Kemren LHK, Kemren KP
Prop : Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Teranginnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpukan minyak dan sumber pencemar lainnya (lokasi)	5	11	Kemren LHK, Kemren KP	Kemren LHK, Kemren KP
Prop : Percegahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Terkecilnya timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik melalui pengurangan dan pemanfaatan timbulan sampah	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (Juta ton) Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (Juta ton)	1 dan 5 1 dan 5	16,4 50,7	Kemren LHK	Kemren LHK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Memangkurnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	Persentase penghapusan merkuri dari buanahe tahun 2019 sebesar 50 ton di 180 kdb/ kda di 30 Provinsi (%)	1 dan 5	10		Kemren LHK
Prop : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Memangkurnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tempat merkuri di PESK yang berizin (unit)	1 dan 5	9		Kemren LHK
KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber tempat yang terdegradasi (unit) Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan disanitasi restorasi gambut (ha) Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton) Jumlah kawasan pekar dan pulau-pulau kecil nasak yang dipulihkan (lokasi) Jumlah kawasan pekar dan pulau-pulau kecil nasak yang dipulihkan (lokasi)	2 dan 5 1 dan 5 5 5 5	2 7 310.000 305.000 6 25		Kemrenkes, Kemren LHK, KPRBU
Prop : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Terlaksananya Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan dinasitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	5 dan 2	300.000		Kemren LHK
Prop : Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Terlaksananya Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha) Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan dideklarasikan secara nasional (ha) Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan industri yang terpublikasi (ton) Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non industri yang terpublikasi (ton)	5 dan 2 1 dan 5 1 dan 5 1 dan 5	10.000 7.060 270.000 35.000		Kemren ESDM, Kemren LHK, Kemren LHK, Kemren KP
Prop : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Prop : Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah Prop : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Sawa Lar Terancam Punah	Terlaksananya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Terlaksananya Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Sawa Lar Terancam Punah	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nasak yang dipulihkan (lokasi) Jumlah kawasan konservasi yang dibangun dan dipulihkan (lokasi) Peribudyaan keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (luta, hai)	1 dan 5 5 5 5	6 1,8 29,5		Kemren KP, Kemren LHK, Kemren LHK
KP : Penguatan Kolaborasi dan Penguatan Hubung di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Kolaborasi dan Penguatan Hubung di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan izin yang saat terdapat kebutuhan (%) Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kebutuhan yang dibangun (kasus) Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha) Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perinderaan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (daerah)	5 5 5 5	60 387 1.900.000 7		Kemren LHK, LPP

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP RAHAMAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang terwujud dan jumlah KLHS yang jumlahnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya Tampung (KLHS)	5	30		Kemendagri
Prop : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi keatahanannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (lembaga) Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin Lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Mendukung secara Elektronik/OSS (provinsi/kab/kota)	5	1500		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (perkar)	5	285		MA, Kejaksaan, Kemendagri
Prop : Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecapaian penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	5	0,10		
KP : Peningkatan Sistem	Meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kelengkapan dan penguatan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	Rasio investasi PDB terhadap APBD nasional	5	0,47		
KP : Peningkatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Terlaksananya Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat (layanan)	4	5		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kedarifan	Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan (kegiatan)	4	15		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kedarifan	Jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal (SMP) LHK (kegiatan)	1	100		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kedarifan	Jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal (SMP) LHK (kegiatan)	4	225		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kedarifan	Persentase daerah yang memiliki pejabat dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai (%)	2	70		Kemendagri, Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kebencanaan	Jumlah keb/kuat yang memiliki Standar Minimal Pemenuhan di daerah yang memiliki logistik dan perbaikan penanggulangan bencana yang memadai (%)	3	225		BNPB
Prop : Integrasi Kebijakan Kajihsan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Terlaksananya Integrasi Kebijakan Kajihsan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kajihsan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian) Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana (lokumen)	2	50		Kemend ESDM
Prop : Penguatan Penguatan Darurat Bencana	Terlaksananya Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa (jiwa)	1	0,2		Kemendes, BNPB, Kemendek
Prop : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil Kantikan kehadiran di daerah macakencana (%)	2	75		Kemend KURAM, BNPB, Kemendek, Kemendek
Prop : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Menguatnya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Jumlah sistem mitigasi multi ancaman bencana (MHEWSI) terpadu (sistem) Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana (kelompok)	2	1		Kemend ESDM, BMKG, ERG, BNPB, LPP RRI, Kemendek
Prop : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Menguatnya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan mitigasi multi ancaman bencana (keab/keca)	1	514		
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	Kemalkan indeks kesiapsiagaan bencana (indeks) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (%) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (%) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (%)	1	0,0044		
Prop : Peningkatan Ketahanan Sektor dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	5	8		Kemend LHK, Kemend KP, BMKG
Prop : Peningkatan Ketahanan Sektor dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Pening tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	2 dan 5	31		Kemend LHK
Prop : Peningkatan Ketahanan Sektor dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Lasa hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air (ha)	2 dan 5	56.000		Kemend LHK
Prop : Peningkatan Ketahanan Sektor dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkatkan Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	1 dan 5	1.275		Kemend LHK, BMKG, Kemendek
Prop : Peningkatan Ketahanan Sektor dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (teknologi)	5	1		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DURKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Perindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah kab/kota yang mempelengarkan Kabupaten/kota sehat (KCS) (kab/kota)	3	220		Kemendes
PP : Pembangunan Rendah Karbon	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, PPFU, serta peisir dan kelautan	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%) Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%) Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%) Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor PPFU (%) Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor peisir dan kelautan (%)	2 dan 5 2 dan 5 2 dan 5 2 dan 5 2 dan 5	14,06 35,11 6,89 4,18 5,60		
KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar) Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	2 dan 5 2 dan 5 2 dan 5	14,5 138 0,9		PLN, Swasta, Kemen ESDM, Pertamina
Prop : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan	Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT (MW)	2 dan 5	1001,1		Kemen ESDM
Prop : Efisiensi dan Konservasi Energi	Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	Pemanfaatan boiler untuk Domestic (tata kila hiri) (peralatan)	2 dan 5	10,2		Kemen ESDM
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan disafitiasi restorasi gambut (ha) Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha) Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	5 5 5	310.000 434.000 70		
Prop : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	2 dan 5	300.000		Kemen LHK
Prop : Rehabilitasi Hutan Lahan dan Restorasi	Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan restorasi	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	5 dan 2	10.000		Kemen LHK
Prop : Pengurangan Lagi Deforestasi Pertanian	Perkembangan lagi deforestasi Terlasmananya Optumasi Lahan pertanian	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	5	434.000		Kemen LHK
KP : Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah	Jumlah Optumasi Lahan pertanian (ha)	5	100.000		Kementan
		Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	5	67		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DURUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah pengurangan timbunan sampah secara nasional (tun ton)	1 dan 5	16,4		Kemendagri
KP : Pengembangan Industri Hijau	Meningkatnya keberlanjutan industri	Perusahaan Industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (%)	5	9		Kemempertin, Kemendagri
Prop : Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	Meningkatnya penerapan proses dan teknologi yang lebih hijau	Laporan pertanggung jawaban masalah limbah B3 melalui standarisasi, circular economy dan pedoman (laporan)	5	2		Kemendagri, Kemendagri
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	5	1.650		Kemendagri, Kemendagri
Prop : Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (lokasi)	5	6		Kemendagri, Kemendagri
Tambahkan anggaran yang masih dalam proses untuk pendanaan proyek:						
Penguatan Ketahanan Bencana						

Keterangan:

Dukungannya terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penguatan Birokrasi
- 4) Penguatan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (Prop) dan Proyek KI masih dalam proses pendalaman dan pendataan di berbagai Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rencana pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Private Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional merujuk Belanja K/L dan KPRU/AP, *Perencanaan angka, identifikasi dan integrasi antarmasalah*, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DURKUNGAN TERHADAP ABAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
PP : Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	Jumlah kegiatan / kegiatan atau kelola informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	3	31.329.829,9	
KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Terwujudnya penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	4	75,35		
Prop : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	Terwujudnya penguatan peraturan perundangan bidang politik	Jumlah penyusunan UU Bidang Politik yang lebih komprehensif (UU)	3	2		Kemendagri
Prop : Penguatan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	Jumlah peningkatan bantuan keuangan partai politik (suara sah)	3	126.376.418		Kemendagri
Prop : Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Terlaksananya Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Jumlah peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik (orang)	1	50		Kemendagri
Prop : Penguatan Demokrasi di Daerah	Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi (provinsi)	3	15		Kemendagri
KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Terlaksananya penguatan kesetaraan dan kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (nilai)	3	82,50		
		Skor IDI Variabel Kesetaraan (nilai)	3	77,90		
		Indeks Kerewanan Pemilu (nilai)	3	45		
Prop : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilu	Terlaksananya pendidikan politik dan pendidikan pemilu	Terperntuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Terpadu Partisipatif di Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota (saku)	1	549		Kemendagri, Kemen PPPA, KPU, Bawaslu
Prop : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan	Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan strategis	Jumlah pelaksanaan pemilu yang akuntabel dan strategis di daerah (daerah)	1	2.100		KPU
Prop : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik (orang)	1	200		Kemendagri

PROGRAM PRIORITAS (PJ)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik	Presentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	1	71		Kemenkominfo, KIP
		Presentase konten informasi publik yang berkualitas (%)	1	83		
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang)	1	62.264		
		Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas kerubandian informasi publik (dokumen)	3	3		
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang)	1	62.264		
		Jumlah masyarakat yang mendapat pengamalan TIK (orang)	1	4.400		
		Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika (kegiatan)	3,4	1		
		Indeks Keterbacaan Pers (nilai)	1,5	74,3		
		Jumlah lembaga penyiaran yang berakreditasi (lembaga penyiaran)	1,5	57		
		Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (Forum) (nilai)	5	10		
PP : Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional	Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI/BNRI (nilai)	1	87,00		Kemenkominfo, KPI
		Indeks Kemampuan Perundingan Batas Maritim WNI/BNRI (nilai)	2	49,64		
		Presentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan (%)	1	74		
KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perbindungan WNI di Luar Negeri	Terwujudnya Penguatan Integritas NKRI dan Perbindungan WNI di Luar Negeri	Terlaksananya peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemertaan batas negara	2	100		Kemertu, Kemendagri, BIG
		Presentase penyelesaian perbatasan dan percepatan pemertaan batas negara	2	100		

PROGRAM PRIORITAS (PJ)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARABIAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	Indeks Pemantauan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri (nilai)	1	96,42		Kemenu, Kemaker, BP2MI
		Indeks Penguatan Sistem Kolaborasi Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (nilai)	1	95,38		
		Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (nilai)	1	95,48		
KP : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional terkumpul KSP (Rp Miliar)	5	85		
Prop : Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber Mekanisme Perundingan Baru Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme perundingan baru kerjasama pembangunan internasional	Tingkat Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional (%)	5	2,48-2,55		Kemendag, Kemenu, Kemendikbud, Kemerk, KP, BRCM
Prop : Peningkatan lingkungan yang mendukung perubahan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Tercapainya lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Presentase Pembertarian Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI (%)	5	92		Kemenu, LPP RRI
KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Meningkatnya citra positif di dunia internasional	Presentase Dukungan Konsisten Internasional terhadap Promosi Aser-Aser Diplomatik Publik Indonesia (%)	5	98		
Prop : Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	Terusunannya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	Presentase Prokardana dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral (%)	5	96		
KP : Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	Presentase rekomendasi dan prokardana Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN (%)	5	96		
		Presentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditandatangani oleh Stakeholder dalam Negeri (%)	5	85		
		Presentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri (%)	5	99		

PROGRAM PRIORITAS (PJ)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral (rekomendasi/prakarsa)	5	250		Kemenu
Prop : Optimalisasi kontribusi Indonesia dan Ujran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Terlaksananya Optimalisasi Kontribusi Indonesia dan Ujran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN (rekomendasi/prakarsa)	5	153		Kemenu
PP : Peningkatan Hukum Nasional	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap pengadilan	Peringkat jumlah putusan peradilan (PKC) diakhir Pemerintah Indonesia (peringkat)	5	10		Kemenu
KP : Penataan Regulasi	Terlaksananya Penataan Regulasi	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	5	4,03		
Prop : Pembentukan Lembaga Pengolah Regulasi	Terlaksananya Lembaga Pengolah Regulasi	Persentase judicial review yang dikabulkan MK dan MA (%)	3	11,15 dan 10,05		
Prop : Pembentukan Lembaga Pengolah Regulasi	Terlaksananya Lembaga Pengolah Regulasi	Persentase penurunan perundang-undangan yang dibatalkan (%)	3	0,1		MA, MK
Prop : Pembentukan Substansi Hukum	Terlaksananya Pembentukan Substansi Hukum	Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah (UU)	3	1		Komnas Perempuan, Kemerkumham,
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Terlaksananya Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoB Indonesia untuk aspek enforcing contracts (peringkat)	5	110		
		Peringkat EoB Indonesia untuk aspek resolving insolvency (peringkat)	5	28		
		Peringkat EoB Indonesia untuk aspek getting credits (peringkat)	5	28		
		Persentase Pelaku Resolvis (peringkat)	5	8,06		
		Persentase checkus putusan perdata (%)	5	15		MA, Kemerkumham
Prop : Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	Persentase penggunaan alternatif pemidanaan (%)	5	15		MA, Kemerkumham, Kejaksaan RI
Prop : Perempuan pendekatan Keadilan Resoratif	Terlaksananya perempuan pendekatan Keadilan Resoratif	Jumlah wilayah kerja inisiasi perengk hukum yang mengimplementasikan SPP TI (wilayah kerja)	1	15		MA, Kemerkumham, Kemenko Polhukam, MA, Kemerkumham, Kejaksaan RI, KPK, Polri
Prop : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Terwujudnya Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Indeks Integritas Hakim (nilai)	5	212		KY
Prop : Peningkatan integritas dan pengawasan hakim	Terlaksananya Peningkatan integritas dan pengawasan hakim		1	7,04		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (POP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terwujudnya Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Presentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Provinsi) (%)	4	92,00		
		Presentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kabupaten) (%)	4	80,00		
		Presentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kota) (%)	4	92,00		
		Presentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (Kementerian/Lembaga) (%)	4	96,00		
		Presentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (Provinsi) (%)	4	87,00		
		Presentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (Kabupaten/Kota) (%)	4	55,00		
		Presentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	100		
		Presentase LPBRK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	80		
		Presentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	49		
		Presentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	15		
POP : Manajemen Talenta Nasional ASN	Terbangunnya Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah Instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN (K/L/Provinsi/Kab/Kota)	1	Tahun 2021 tidak dilakukakan penghitungan		Kemen PANRB, LAN, BKN
POP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Terlaksananya Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (P)	1	108		Kemen PANRB, KASN, LAN, BKN
KP : Transformasi pelayanan publik	Terwujudnya transformasi pelayanan publik	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat Kepuasan Pelayanan Publik Kategori Baik (Instansi)	4	142 per 587		
POP : Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	Terselesainya portal pelayanan publik Pemerintah Pusat (portal pelayanan publik)	4	1 (tahun 2024)		Kemen PANRB
		Terselesainya portal pelayanan publik Pemerintah Daerah (portal pelayanan publik)	4	1 (tahun 2024)		

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ABAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan (laporan)	4	6300		Kemren PANRB, Ombudsman RI
Prop : Penguatan ekosistem inovasi	Terlaksananya Penguatan ekosistem inovasi	Jumlah unit pelayanan publik (U/P) yang mereplikasi inovasi (U/P)	4	500		Kemren PANRB, LAN
Prop : Penguatan pelayanan terpadu	Terlaksananya Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Mal Pelayanan Publik di Kota Besar/ Sedang/ Kecil (MPP)	4	9		Kemren PANRB
KP : Pemataan kelembagaan dan proses bisnis	Teratnya kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
Prop : Pemataan kelembagaan	Terlaksananya Pemataan kelembagaan	Jumlah instansi yang didata kelebagaannya (Instansi)	4	21		Kemren PANRB
Prop : Penerapan SPBE terintegrasi	Terlaksananya penerapan SPBE terintegrasi	Integrasi portal pelayanan publik dan integrasi portal administrasi pemerintahan (portal)	4	2 (Tahun 2024)		Kemren PANRB, ANRI, LKPP
KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	80		
		Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP (%)	4	96		

PROGRAM PRIORITAS (PJ)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri		Indeks Risiko Terorisme (Pelaku) Indeks Risiko Terorisme (Target) Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara (pelanggaran) Angka Kejadian Konflik (kejahatan) Angka Korban Pengungut Internal (orang) Clearance Rate Terorisme (%)	5 5 5 5 5 5	38,14 84,36 <300 50 515.500 75		
Prop : Peningkatan Derahalisasi dan Penguatan Terorisme	Terlaksananya Peningkatan Derahalisasi dan Penguatan Terorisme	Jumlah Pendidikan terhadap masyarakat terpeper paham radikal terorisme (Orang) Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (kegiatan) Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanganan terorisme (instansi) Jumlah Objek Vital dan Target Rentan yang mendapat Penguatan (Objektas dan Target Rentan)	5 5 5 2	125 134 40 1023		Polri, BNPT, BIN, Kemensos
Prop : Penguatan Objek Vital dan Target Rentan	Terlaksananya Penguatan Objek Vital dan Target Rentan	Jumlah Jenis Supras Perbatasan yang Dihangun (Orang)	2	5		Polri
Prop : Penguatan Perbatasan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Terlaksananya Penguatan Perbatasan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Jumlah Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam (orang) Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan Sarana Prasarana Perbatasan dan Keamanannya (PPKT)	1 2	180 41		Kemham, Kemkamsihan, Polri, BNPP
Prop : Penguatan Konflik Secara Humanis	Terlaksananya Konflik Secara Humanis	Terlaksananya Perensi Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten (keanu)	1	25		Kemendagri, Kemensos
Prop : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Terwujudnya Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Anggota Satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis (orang) Jumlah Kegiatan Penyelamatan di Wilayah Rawan dan Bencana (kegiatan)	1 1	15.338 1		Polri

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
KP : Penguatan Kemampuan Perumahan dibareng Confidence Building Measures (CBM) Prop : Penguatan Alutsista Prop : Pemeliharaan dan perawatan alutsista Prop : Pembangunan sarana-prasarana perumahan Prop : Peningkatan Profesionalisme dan Keagihan Prajurit Prop : Pembangunan dan Pengembangan Industri Perumahan KP : Penguatan Keamanan Laut Prop : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut Prop : Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut KP : Penguatan Keamanan dan Ketertihan Masyarakat Prop : Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Prop : Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Terwujudnya Penguatan Kemampuan Perumahan dibareng Confidence Building Measures (CBM) Terperintahnya Penguatan Alutsista Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan alutsista Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana perumahan Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme dan Keagihan Prajurit Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Industri Perumahan Terwujudnya Penguatan Keamanan Laut Terlaksananya Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut Terwujudnya Penguatan Keamanan dan Ketertihan Masyarakat Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Terlaksananya Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Angka Pemenuhan MEI (%) Persentase Kontribusi Industri Perumahan (%)	2 5	79 250			
		Jenis Alutsista yang diadukan (jenis)		2	60		Kemhan
		Jenis Alutsista dengan Persentase Pemenuhan Norma Harwat 100% (jenis)		2	49		Kemhan
		Luas pembangunan Sarana Prasarana Perumahan (M2)		2	118.000		Kemhan
		Jumlah unit Rumah Dhuas yang terbangun (unit)		2	2.410		Kemhan
		Jumlah Rumah Sederet yang terbangun (unit)		1	9		Kemhan
		Jumlah jenis Apalbakam yang dikembangkan (jenis)		5	3		Kemhan
		Angka Pelanggaran Bulhuan dan Gangguan Keamanan di Laut (kasus)		5	265		
		Persentase Cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing (%)		5	45		Kemhan, Kemhan KP, Balakamba, Polri
		Clearance Rate Tindak Pidana Laut (%)		5	75		Polri
		Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)		1	1,86		
		Crime Rate (orang/100.000 penduduk)		5	112		
		Pelayanan Publik Poli yang Prima (%)		4	63		
Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika (%)		4	86		BNN, Polri		
Jumlah Kemaran yang Pulih dari Tanaman Terlarang (kemaran)		5	3		BNN, Kemempora, Kemrensos		
Indeks Ketahanan Diri Remaja (nilai)		1	51				
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Fisik (%)		1	6,5				
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Psikologis (%)		1	6,5				

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (Prop)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (Rp. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Prop : Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Terwujudnya Pencegahan Kejahatan Siber Melalui Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Skor Pilar Cooperation pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	1,5	0,12		BIN

Keterangan:

a. Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi:

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Peningkatan Keamanan Regulasi
- 4) Peningkatan Keamanan Berkeadilan
- 5) Transformasi Ekonomi

b. Peningkatan target pada RP Peningkatan Akses terhadap Keahlian

*1) Peningkatan target pada RP Peningkatan Akses terhadap Keahlian

**1) Peningkatan dilakukan per tiga tahun, baseline 2019 sebesar 61,2 %

***1) Peningkatan dilakukan per tiga tahun, baseline 2019 sebesar 75,3%

Catatan:

1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;

2) Beberapa Proyek Prioritas (Prop) dan Proyek KI masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Practical Meeting*;

4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPRU/AP. Penulisan angka, identifikasi dan integrasi antarmuka, dan sumber pendanaan (K/L, DAK, BUNN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MATRIKS MAJOR PROJECT
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

MATRIKS MAJOR PROJECT RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL/ MAJOR PROJECT	ALOKASI (Rp. JUTA)
MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN	13.711.347,8
10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	
9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter	
Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	
Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas : Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	
Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit	
Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	
Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	
MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN	3.810.761,0
Pembangunan Wilayah Batam-Bintan	
Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	
Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	
Ibu Kota Negara (IKN)	
Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	
Pusat Kegiatan Strategis Nasional : PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke	
Wilayah Adat Papua : Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING	67.557.747,6
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	
Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)	
Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	
Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	
Penguatan Sistem Kesehatan Nasional	
MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	25.886.896,9
Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	
Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	
KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	
Kereta Api Makassar-Pare Pare	
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	
18 Waduk Multiguna	
Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak	
Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)	
Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	
Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	
Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	
Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	
Jembatan Udara 37 Rute di Papua	
Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	
Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	

PRIORITAS NASIONAL/ MAJOR PROJECT	ALOKASI (Rp. JUTA)
Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	
Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	
Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM	2.021.610,7
Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	
Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	
MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	881.898,9
Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT	
Penguatan Keamanan Laut di Natuna	
TOTAL	113.870.262,8

Keterangan :

- 1) Beberapa *Major Project* utamanya didukung oleh BUMN/Swasta/Daerah. Belanja KL dialokasikan sebagai fasilitator. Contoh: 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, termasuk *Major Project* terkait pengembangan kewilayahan;
- 2) Dalam Pagu anggaran 2021 terdapat tambahan anggaran antara lain untuk Ketahanan Pangan, Pengembangan Kawasan Industri, Penguatan ICT, Reformasi Perlindungan Sosial yang dapat diarahkan pemanfaatannya untuk mendukung *Major Project*. Hal ini masih dalam proses pendetilan
- 3) Rincian proyek dalam *Major Project* masih terus dilakukan penajaman dan pendalaman kesiapan pelaksanaan;
- 4) Alokasi *Major Project* baru mencakup Belanja KL. Integrasi antar instansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan sampai dengan penetapan APBN 2021.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO